

BAB VI

PRIORITAS APBD 2005

Dengan adanya kebijakan belanja APBD pola baru, dimana anggaran belanja didasarkan pada kinerja unit (*performance-based budgeting*), maka perlu disusun arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan kegiatan tersebut pada masing-masing bidang pembangunan, yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi rincian kegiatan dan indikatornya serta berorientasi pada penyelesaian masalah.

A. BIDANG HUKUM, KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN KESATUAN BANGSA

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan bidang ini ditujukan pada penegakan hukum, peningkatan kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum, serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kenyamanan Jakarta yang lebih kondusif.

2) Strategi

Menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas individu aparat, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan hukum dan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian hukum dan keharmonisan kehidupan di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman, tertib dan tenteram.

3) Program dan Kegiatan Prioritas

- a) Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Daerah, dengan kegiatan : (1) Penyusunan peta kebutuhan produk hukum (2) Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta produk hukum lainnya

- b) Peningkatan Kesadaran Hukum, dengan kegiatan : Sosialisasi produk hukum melalui multimedia dan tatap muka, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah.
- c) Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum, dengan kegiatan : (1) Pemberian bantuan hukum pada semua unsur Pemda dan masyarakat dengan menggunakan tenaga-tenaga hukum Profesional, (2) Peningkatan disiplin aparat penegak hukum dan konsistensi dalam menerapkan produk hukum serta koordinasi dengan para penegak hukum.
- d) Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, dengan kegiatan : (1) Koordinasi dan komunikasi dengan para penegak hukum (2) Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan HAM (3) koordinasi dan komunikasi antar suku/etnik/golongan (4) penurunan tingkat kriminalitas (5) peningkatan kualitas dan kuantitas Banpol/Linmas sesuai rasio.
- e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam trantibmas dan penanggulangan bencana, dengan kegiatan : (1) sosialisasi tentang pentingnya kamtibmas (2) peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang tramtib dan penanggulan bencana.
- f) Peningkatan pencegahan penanggulangan bencana dan kebakaran, dengan kegiatan : (1) penyusunan master plan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran, (2) peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, (3) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran, (4) peningkatan kualitas dan kuantitas pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana, (5) peningkatan keterampilan aparat pemadam kebakaran, (6) peningkatan kuantitas petugas pemadam kebakaran sesuai standar kompetensi (regenerasi petugas usia lebih dari 45 tahun).
- g) Pengembangan sarana dan prasarana tramtib dan penanggulangan bencana, dengan kegiatan : (1) penyusunan master plan peralatan kamtibmas, (2) peningkatan sarana dan prasarana tramtib dan

- penanggulangan bencana, (3) peningkatan operasional crisis center, (4) peningkatan penanganan bencana alam akibat ulah masyarakat.
- h) Pemantapan Integrasi Bangsa, Demokrasi dan HAM, dengan kegiatan: (1) peningkatan kerukunan dan pembauran dalam kehidupan masyarakat Jakarta, (2) Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat Jakarta, (3) Peningkatan kesadaran demokrasi dan HAM aparat serta masyarakat Jakarta, (4) Peningkatan kewaspadaan tentang ATHG dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Jakarta yang lebih kondusif.
- i) Pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan, dengan kegiatan: (1) Peningkatan hubungan antar lembaga kemasyarakatan (2) Peningkatan hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka penerapan kebijakan bidang politik dan menyelesaikan masalah-masalah politik, (3) peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat Jakarta terhadap kerawanan sosial, (4) Pembinaan hubungan antar lembaga.

4) Matriks Indikator Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
HUKUM			
1. Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Tersedianya peraturan perundang-undangan daerah yang sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat	1. Penyusunan peta kebutuhan produk hukum	<i>Tersusunnya peta kebutuhan produk hukum yang harus disempurnakan dan disusun selama 1 tahun dalam bentuk hasil kajian evaluasi dan penyusunan program legislasi daerah.</i>
		2. Penyusunan Raperda dan Penyempurnaan Perda serta produk hukum lainnya	<i>a) Tersusunnya 6 Raperda baru yang akan disampaikan ke pihak Legislatif untuk dibahas.</i> <i>b) Tersusunnya 9 Perda hasil penyempurnaan yang akan disampaikan ke pihak Legislatif untuk dibahas.</i> <i>c) Terlaksananya penyempurnaan produk hukum setingkat Keputusan Gubernur dan peraturan lainnya dari berbagai bidang.</i> <i>d) Terselenggaranya persiapan pembentukan Ombudsman Daerah pada tahun 2006.</i>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
2. Peningkatan Kesadaran Hukum	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dengan sosialisasi yang efektif melalui multi media	Sosialisasi produk hukum melalui multimedia dan tatap muka, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan Pusat dan Daerah	<p>a) Terlaksananya penerangan hukum melalui penyuluhan hukum terpadu, kampanye kesadaran hukum, dialog publik tentang hukum yang melibatkan kalangan perguruan tinggi (termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa), lembaga profesi hukum, lembaga swadaya masyarakat, ormas dan berbagai kelompok lainnya di masyarakat.</p> <p>b) Terlaksananya sosialisasi produk hukum daerah melalui media massa terutama melalui media radio dan TV minimal 12 kali dalam satu tahun.</p> <p>c) Dapat diaksesnya naskah Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya yang berlaku sampai dengan tahun 2004 melalui website Pemda DKI Jakarta</p>
3. Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum	Tersusunnya mekanisme yang lebih baik dalam pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat	1. Pemberian bantuan hukum pada semua unsur Pemda dan masyarakat dengan menggunakan tenaga-tenaga hukum profesional	<p>a) Terselesaikannya perkara yang terkait dengan unsur pemerintah daerah di Peradilan Umum dan TUN.</p> <p>b) Meningkatnya jumlah bantuan/ perlindungan hukum kepada aparat/unit.</p> <p>c) Tersedianya bantuan dan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin dengan menggunakan tenaga-tenaga hukum profesional.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan disiplin aparat penegak hukum dan konsistensi dalam menerapkan produk hukum serta koordinasi dengan para penegak hukum	d) <i>Terselesaikannya sebagian besar masalah sengketa pertanahan milik Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.</i> a) Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum daerah dan evaluasi menyeluruh terhadap pelatihan tersebut yang melibatkan tenaga profesional. b) <i>Terlaksananya penerapan sanksi bagi aparat penegak hukum.</i> c) <i>Meningkatnya koordinasi dengan para penegak hukum.</i>
KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA			
1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban	a) Menurunnya jumlah tindak kekerasan dan angka kriminalitas b) Meningkatnya sikap, budaya dan perilaku toleran antar berbagai suku, agama, ras dan golongan c) Menurunnya tingkat kriminalitas	Koordinasi dan komunikasi dengan para penegak hukum 1. Sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan HAM 2. Koordinasi dan komunikasi antar suku/etnik/golongan 1. Penurunan tingkat kriminalitas	<i>Meningkatnya koordinasi dan komunikasi dengan penegak hukum.</i> <i>Terlaksananya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, pembauran dan nilai-nilai kepahlawanan.</i> <i>Meningkatnya koordinasi dan komunikasi antar suku/etnik/golongan.</i> a) Tersusunnya peta kerawanan sosial dan kebutuhan ketersediaan Banpol/Linmas b) <i>Meningkatnya jumlah penertiban pelanggaran Perda dan Operasi Bersih.</i>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		<p>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas Banpol/Linmas sesuai rasio</p>	<p>a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Banpol/Linmas sampai mencapai rasio 1 : 1.500 yang juga memperhatikan komposisi umur, pendidikan dan jenis kelamin.</p> <p>b) Meningkatnya koordinasi dengan aparat keamanan.</p> <p>c) Terlaksananya pelatihan hukum dan HAM terhadap aparat yang melibatkan tenaga profesional yang independen.</p> <p>d) Terlaksananya penempatan petugas secara proporsional.</p>
<p>2. Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Tramtibmas dan Penanggulangan Bencana</p>	<p>Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal kamtibmas</p>	<p>1. Sosialisasi tentang pentingnya kamtibmas</p>	<p>a) Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi Kamtibmas dan penanggulangan bencana melalui medium tatap muka dengan tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, anggota Dekel, tokoh agama, parpol dan ormas di setiap Kelurahan di DKI Jakarta.</p> <p>b) Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi kamtibmas dan penanggulangan bencana melalui medium talkshow di radio.</p> <p>c) Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi kamtibmas dan penanggulangan bencana melalui medium dialog interaktif dengan para mahasiswa di kampus-kampus pada setiap Kotamadya yang pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak BEM.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang tramtib dan penanggulangan bencana	<i>Terbinanya kesiapan potensi masyarakat dalam rangka pengendalian dan pemantauan di sejumlah titik rawan bencana.</i>
3. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	a) Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana yang memadai dan mutakhir.	1. Penyusunan Masterplan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran	Tersedianya pedoman bagi pengembangan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran.
		2. Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Tersedianya sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang sesuai kebutuhan.
		3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kebakaran	Meningkatnya jumlah Balakar di masyarakat.
		4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana	Meningkatnya kesiapan aparat masyarakat dan lingkungan.
	b) Meningkatnya kemampuan dan keterampilan aparat pemadam kebakaran	1. Peningkatan keterampilan aparat pemadam kebakaran	Terlaksananya diklat pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk aparat pemadam kebakaran dan masyarakat.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan kuantitas petugas pemadam kebakaran sesuai standar kompetensi (regenerasi petugas usia lebih dari 45 tahun)	Meningkatnya jumlah petugas pemadam kebakaran sesuai standar kompetensi (usia dibawah 45 tahun).
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Tramtib dan Penanggulangan Bencana	a) Tersedianya peralatan kamtib dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan perkembangan teknologi	1. Penyusunan Master Plan peralatan kamtibmas	Tersusunnya pedoman bagi penyediaan peralatan Kamtibmas.
		2. Peningkatan sarana dan prasarana tramtib dan penanggulangan bencana.	Tersedianya sarana prasarana tramtib dan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan.
	b) Meningkatnya kecepatan dan keakuratan penanganan gangguan kamtibmas dan bencana	1. Peningkatan operasional crisis center	Meningkatnya sarana dan profesionalisme penanganan <i>crisis center</i> .
		2. Peningkatan penanganan bencana alam akibat ulah masyarakat.	Meningkatnya " <i>Time Respons</i> " aparat di lapangan terhadap kejadian bencana.
KESATUAN BANGSA			
1. Pemantapan Integrasi Bangsa, Demokrasi dan HAM	Berkurangnya perkelahian/perselisihan yang bersifat partisan dan primordial	1. Peningkatan kerukunan dan pembauran dalam kehidupan masyarakat Jakarta.	Terlaksananya pembinaan peran pembauran dan kerukunan oleh lembaga sosial kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, paguyuban dan suku/etnis.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dalam rangka memperkuat ketahanan masyarakat Jakarta.	Meningkatnya semangat kebangsaan dan ketahanan masyarakat Jakarta melalui semiloka, penataran dan penyuluhan.
		3. Peningkatan kesadaran demokrasi dan HAM aparat serta masyarakat Jakarta.	a) Terlaksananya kajian tentang pelaksanaan HAM. b) Terlaksananya pelatihan untuk aparat dan masyarakat tentang HAM, fasilitasi pendidikan politik dan demokrasi.
		4. Peningkatan kewaspadaan tentang ATHG dalam rangka menciptakan tatanan kehidupan masyarakat Jakarta yang lebih kondusif.	Meningkatnya partisipasi masyarakat Jakarta dalam menciptakan stabilitas keamanan Ibukota.
2. Pengembangan Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya kesamaan persepsi terhadap kejadian-kejadian di masyarakat dan terhadap hasil-hasil pembangunan	1. Peningkatan hubungan antar lembaga kemasyarakatan.	Terlaksananya Forum Komunikasi tokoh/organisasi masyarakat dan Forum komunikasi Antar Parpol.
		2. Peningkatan hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka penerapan kebijakan bidang politik dan menyelesaikan masalah-masalah politik.	Meningkatnya hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam menangani masalah politik.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat Jakarta terhadap kerawanan sosial.	a) Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap disintegrasi bangsa. b) Terumuskannya kebijakan Pemantapan Otonomi Daerah. c) Tersusunnya Kebijakan Penelitian dan Penyiapan Pengembangan Wilayah Berbasis Otonomi Daerah. d) Terkoordinasinya Penyelenggaraan Tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan.
		4. Pembinaan hubungan antar lembaga	a) Terbinanya hubungan antar lembaga. b) Terlaksananya Peningkatan Wawasan Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

B. BIDANG PEMERINTAH

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan bidang pemerintahan adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang lebih berkualitas, profesional, transparan dan akuntabel, termasuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka peningkatan kemandirian daerah.

2) Strategi

- a) Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian, struktur organisasi, dan administrasi pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance untuk meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- b) Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah, pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah guna peningkatan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat.
- c) Mengembangkan sistem database yang bersifat informatif, aktual, dan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencapai terciptanya masyarakat informasi yang berbasis pada profesionalisme, terstruktur, sistematis dan akuntabel.

3) Program dan Kegiatan Prioritas

- a) Pengembangan Otonomi Daerah, dengan kegiatan: (1) Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan Otonomi Daerah, (2) Koordinasi, sosialisasi dan monitoring pelimpahan kewenangan wilayah, (3)

Penyempurnaan prosedur juklak juknis dan indikator kinerja pelimpahan kewenangan wilayah.

- b) Pengembangan Pemerintahan Tingkat Propinsi, dengan kegiatan : (1) Pemberdayaan perangkat wilayah, (2) Peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah, (3) Peningkatan koordinasi dan pengembangan bidang sarana dan prasarana kota, (4) Peningkatan koordinasi dan pengembangan bidang perekonomian, (5) Peningkatan koordinasi dan pengembangan bidang kesmas.
- c) Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat, dengan kegiatan : (1) Pembinaan aparatur Walikotamadya, (2) Peningkatan pelayanan prima, (3) Pelaksanaan administrasi wilayah, (4) Pelaksanaan koordinasi, pembangunan tingkat wilayah, (5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan, (6) Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya Jakarta Pusat.
- d) Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara, dengan kegiatan : (1) Pembinaan aparatur Walikotamadya, (2) Peningkatan pelayanan prima, (3) Pelaksanaan administrasi wilayah, (4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah, (5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan, (6) Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya Jakarta Utara.
- e) Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat, dengan kegiatan: (1) Pembinaan aparatur Walikotamadya, (2) Peningkatan pelayanan prima, (3) Pelaksanaan administrasi wilayah, (4) Pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah, (5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan, (6) Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya Jakarta Barat.
- f) Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan, dengan kegiatan: (1) Pembinaan aparatur Walikotamadya, (2) Peningkatan pelayanan prima, (3) Pelaksanaan administrasi wilayah, (4) Pelaksanaan koordinasi, pembangunan tingkat wilayah, (5) Pembinaan lembaga kemasyarakatan,

- (6) Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya Jakarta Selatan.
- g) Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur, dengan kegiatan : (1) pembinaan aparatur Walikotamadya, (2) peningkatan pelayanan prima, (3) pelaksanaan administrasi wilayah, (4) pelaksanaan koordinasi, pembangunan tingkat wilayah, (5) pembinaan lembaga kemasyarakatan, (6) pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya Jakarta Timur.
- h) Pengembangan Pemerintahan wilayah kotamadya dan kabupaten Kepulauan Seribu, dengan kegiatan: (1) Pembinaan aparatur wilayah, (2) peningkatan pelayanan prima, (3) pelaksanaan administrasi wilayah, (4) pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah, (5) pembinaan lembaga kemasyarakatan, (6) pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu.
- i) Penataan Administrasi Pertanahan, dengan kegiatan: (1) peningkatan administrasi pertanahan di DKI Jakarta, (2) penyuluhan dan pembinaan masyarakat di bidang pertanahan, (3) pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, (4) pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah .
- j) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, dengan kegiatan : (1) pengembangan kompetensi dan pembinaan pegawai, (2) pengembangan SDM Kecamatan dan Kelurahan.
- k) Peningkatan Administrasi Kepegawaian, dengan kegiatan : (1) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, (2) penyusunan kebijakan dan penyempurnaan peraturan kepegawaian, (3) pengelolaan kesra pegawai, (4) pengelolaan administrasi kepegawaian.
- l) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dengan kegiatan : (1) pengembangan diklat berbasis kompetensi, (2) pendidikan dan pelatihan dalam rangka

pelimpahan kewenangan, (3) peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif, (4) peningkatan kapasitas diklat.

- m) Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan : (1) Penataan organisasi perangkat daerah, (2) Penataan tata laksana pelayanan umum, (3) Pengembangan jabatan fungsional, (4) Pengembangan organisasi dan perangkat pelimpahan kewenangan.
- n) Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana, dengan kegiatan : (1) Peningkatan kualitas perencanaan, (2) Perencanaan kebijakan tahunan daerah, (3) Pengembangan perencanaan 8 bidang pembangunan, (4) Penyusunan rencana APBD, (5) Koordinasi dan pengembangan perencanaan terpadu (lintas sektor dan lintas wilayah), (6) Penyusunan rencana tindak (action plan) fungsi-fungsi strategis, (7) Pengendalian dan pengawasan perencanaan 8 bidang pembangunan.
- o) Penelitian dan Pengembangan, dengan kegiatan : (1) Pengembangan kerjasama antara Pemprop DKI dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, (2) Pengembangan SDM perencana, (3) Pengembangan penelitian 8 bidang pembangunan, (4) Penataan dan pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan daerah
- p) Peningkatan Pengawasan Fungsional, dengan kegiatan : (1) Peningkatan pengawasan/pemeriksaan reguler, (2) Peningkatan pengawasan dan penanganan kasus KKN, (3) Pelaksanaan diklat teknis fungsional auditor, (4) Peningkatan pembinaan/fasilitasi akuntabilitas kinerja unit satuan kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
- q) Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, dengan kegiatan : (1) Peningkatan program kerjasama Sister City, (2) Peningkatan program kerjasama antar daerah, luar negeri dan dalam negeri serta lembaga.
- r) Peningkatan Perbendaharaan Daerah, dengan kegiatan : (1) Peningkatan kegiatan Pelayanan penerimaan dan pengeluaran daerah, (2) Peningkatan pengolahan data dan informasi, (3) Evaluasi pengembangan

kesisteman/program, (4) Pengendalian sistem informasi realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah, (5) Pengendalian administrasi penerimaan uang daerah dan optimalisasi dana daerah, (6) Peningkatan administrasi penerbitan surat perintah membayar yang membebani APBD,

- s) Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah, dengan kegiatan : (1) Pembinaan administrasi keuangan daerah, (2) Penyempurnaan sistem keuangan daerah, (3) Peningkatan proses dan mekanisme kerja pelayanan administrasi keuangan daerah.
- t) Peningkatan Penerimaan Daerah, dengan kegiatan : (1) Peningkatan sosialisasi, penyuluhan dan partisipasi masyarakat, (2) Peningkatan pelayanan pemungutan pajak daerah, (3) Peningkatan pengawasan pemungutan pendapatan daerah, (4) Peningkatan tertib administrasi dan sistem informasi pendapatan daerah, (5) peningkatan penagihan pendapatan daerah, (6) Peningkatan koordinasi pemungutan pendapatan daerah.
- u) Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah, dengan kegiatan : (1) Pengembangan Sistem Informasi asset daerah, (2) Penyusunan, kebutuhan dan pengadaan barang daerah, (3) Penatausahaan aset-aset daerah, (4) Peningkatan keterpaduan pengelolaan kawasan khusus antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- v) Pengembangan Statistik Daerah, dengan kegiatan: (1) Meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses atas informasi statistik DKI Jakarta, (2) Mengembangkan statistik daerah yang mendukung perencanaan APBD dan peningkatan PAD.
- w) Pengembangan Teknologi Informasi, dengan kegiatan : (1) Pembangunan dan pengintegrasian berbagai sistem informasi yang ada di Pemda Propinsi DKI Jakarta, (2) Pembangunan sistem informasi yang berbasis web, (3) Pemutakhiran database informasi Pemerintah Daerah, (4) Optimalisasi perangkat keras dan perangkat jaringan di lingkungan

Pemprop. DKI Jakarta, (5) Pembangunan sistem informasi manajemen pemerintah daerah

- x) Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi, dengan kegiatan : (1) Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan daerah, (2) Peningkatan sumber daya manusia di bidang kearsipan, (3) Peningkatan pengelolaan naskah sumber arsip,
- y) Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan, dengan kegiatan : (1) Penyajian dan pengolahan data dan informasi , (2) Sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah, (3) Peningkatan pelayanan informasi publik, (4) Peningkatan pelayanan keprotokolan
- z) Pemetaan dan Informasi Pertanahan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan sistem informasi manajemen pertanahan, (2) Pengembangan Pemetaan Geografis dan aplikasi, (3) Pengembangan Pengukuran Rekayasa

4) Matriks Indikator Bidang Pemerintahan.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
PEMERINTAHAN UMUM			
1. Pengembangan Otonomi Daerah	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang sesuai kondisi dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.	1. Perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan otonomi daerah	<p>a) <i>Terlaksananya Evaluasi Kinerja dari Dekel dan Dekot sebagai bahan revisi Perda tentang Dekel dan Dekot.</i></p> <p>b) <i>Tersusunnya materi masukan dan sinkronisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah baik dalam rangka perumusan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait.</i></p>
		2. Koordinasi, sosialisasi dan monitoring pelimpahan kewenangan wilayah	<p>a) Terlaksananya sosialisasi pelimpahan kewenangan wilayah kepada aparat unit terkait pada level Propinsi, Kotamadya, Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>b) Terlaksananya koordinasi tingkat Propinsi dalam pelimpahan kewenangan setiap triwulan.</p> <p>c) Terlaksananya monitoring pelaksanaan pelimpahan kewenangan setiap triwulan.</p> <p>d) Tersedianya data base terkait pelimpahan kewenangan wilayah.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Penyempurnaan prosedur juklak juknis dan indikator kinerja pelimpahan kewenangan wilayah	a) Tersedianya prosedur juklak dan juknis pelimpahan kewenangan. b) Tersedianya indikator penilaian kinerja Kelurahan dan Kecamatan dalam pelimpahan kewenangan.
2. Pengembangan Pemerintahan Tingkat Propinsi	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan tingkat Propinsi	1. Pemberdayaan perangkat wilayah	Tersedianya panduan aparat dalam mengelola lembaga masyarakat dan partisipasi masyarakat.
		2. Peningkatan pelayanan masyarakat di wilayah	a) Tersedianya evaluasi atas pelayanan wilayah yang meliputi paket kapasitas penyediaan dan standar pelayanan di wilayah. b) Penyediaan informasi tentang pelayanan berupa poster dan leaflet pada kantor Walikota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. c) Tersusunnya prosedur, standar dan panduan pelayanan kepada aparat wilayah. d) Terlaksananya penyempurnaan standarisasi sarana dan prasarana wilayah.
		3. Peningkatan koordinasi dan pengembangan bidang sarana dan prasarana kota.	Tersedianya hasil analisis dan evaluasi kegiatan bidang sarana dan prasarana kota
		4. Peningkatan koordinasi dan pengembangan bidang perekonomian.	Tersedianya hasil analisis dan evaluasi kegiatan bidang perekonomian

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		5. Peningkatan koordinasi dan pengembangan bidang kesmas.	Tersedianya hasil analisis dan evaluasi kegiatan bidang kesmas
3. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Pusat	1. Pembinaan aparatur Walikotamadya	a) Terlaksananya pembinaan secara teratur aparat Kelurahan dan Kecamatan b) Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang bebas KKN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diukur dengan menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dimaksud.
		2. Peningkatan pelayanan prima	a) Terlaksananya koordinasi pengembangan pelayanan dari satu atap menjadi satu pintu b) Terlaksananya evaluasi terhadap peningkatan pelayanan prima yang telah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan peningkatannya.
		3. Pelaksanaan adminstrasi wilayah	Meningkatnya efisiensi administrasi wilayah Kotamadya Jakarta Pusat
		4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah	a) Meningkatkan kualitas pembangunan kawasan Monas, Senen, Tanah Abang, wisata malam dan kawasan unggulan lainnya. b) Terlaksananya penataan sistem kepegawaian di Jakarta Pusat. c) Meningkatkan kualitas Jakarta Pusat menuju kota sehat.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan	a) Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan RT/RW dan Kelurahan. b) Terselenggaranya forum warga tingkat RW.
		6. Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya	Terlaksananya koordinasi Kelurahan, Kecamatan dan unit-unit terkait di wilayah dalam pelimpahan kewenangan
4. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Utara	1. Pembinaan aparat walikotamadya	a) Terlaksananya pembinaan secara teratur aparat Kelurahan dan Kecamatan b) Meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang bebas KKN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diukur dengan menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dimaksud.
		2. Peningkatan pelayanan prima	a) Terlaksananya koordinasi pengembangan pelayanan dari satu atap menjadi satu pintu b) Terlaksananya evaluasi terhadap peningkatan pelayanan prima yang telah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan peningkatannya.
		3. Pelaksanaan administrasi wilayah	Meningkatnya efisiensi administrasi wilayah kodya Jakarta Utara.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		<p>4. pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah</p>	<p>a) Terciptanya kondisi lingkungan yang aman nyaman dan dihuni oleh masyarakat yang sehat di kodya Jakarta Utara.</p> <p>b) Meningkatnya koordinasi pengendalian pembuangan limbah industri dan domestik di perairan pantai teluk Jakarta.</p> <p>c) Terlaksananya koordinasi pembangunan Banjir Kanal Timur di WilKodya Jakarta Utara, Normalisasi Waduk Pluit, Penataan Simpang Lima Semper & Underpass.</p> <p>d) Terlaksananya pembangunan Pantai Publik Marunda.</p> <p>e) Terlaksananya normalisasi Kali Buntu, penataan pemukiman nelayan Muara Angke, Kamal Muara & Kali Baru.</p> <p>f) Tertatanya 1.200 pedagang K-5 di Lorong 103 dan 104.</p> <p>g) Meningkatnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di Wilayah Kodya Jakarta Utara, Terbangunnya stadion olah raga di Sunter Kec. Tanjung Priok.</p> <p>h) Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penyandang cacat, Terbangunnya kompleks pembinaan orang cacat (SLB) di Rorotan Kec. Cilincing.</p> <p>i) Meningkatnya kebersihan lingkungan permukiman.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			j) Meningkatnya kesadaran masyarakat kodya Jakarta Utara terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang ketertiban umum, Meningkatnya jumlah pelanggar ketertiban umum yang ditindak.
		5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan	a) Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan RT/RW dan Kel. b) Terselenggaranya forum warga tingkat RW.
		6. Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya	Terlaksananya koordinasi Kelurahan, Kecamatan dan unit-unit terkait di wilayah dalam pelimpahan kewenangan.
5. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Barat	1. Pembinaan aparatur Walikotamadya	a) Terlaksananya pembinaan secara teratur aparat Kelurahan dan Kecamatan. b) <i>Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang bebas KKN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diukur dengan menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dimaksud.</i>
		2. Peningkatan pelayanan prima	a) Terlaksananya koordinasi pengembangan pelayanan dari satu atap menjadi satu pintu b) <i>Terlaksananya evaluasi terhadap peningkatan pelayanan prima yang telah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan peningkatannya.</i>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Pelaksanaan administrasi wilayah	Meningkatnya efisiensi administrasi wilayah kodya Jakart Barat.
		4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah	a) Terwujudnya Desa Wisata Kamal. b) Terlaksananya pengembangan sentra usaha kecil menengah di Rawa Buaya. c) Meningkatnya pendapatan petani ikan cupang di Slipi. d) Meningkatnya kualitas lingkungan Kota Tua. e) Terlaksananya penataan Waduk Grogol. f) Meningkatnya kualitas Jakarta Barat menuju Kota Sehat. g) Terlaksananya pengembangan hutan kota Srengseng. h) Meningkatnya penataan wilayah perbatasan. i) Meningkatnya keteraturan jalan kebanggaan.
		5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan	a) Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan RT/RW dan Kelurahan. b) Terselenggaranya forum warga tingkat RW.
		6. Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya	Terlaksananya koordinasi Kelurahan Kecamatan dan unit-unit terkait di wilayah dalam pelimpahan kewenangan

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
6. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Selatan	1. Pembinaan aparatur Walikotamadya	a) Terlaksananya pembinaan secara teratur aparat Kelurahan & Kecamatan b) <i>Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang bebas KKN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diukur dengan menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dimaksud.</i>
		2. Pengembangan pelayanan prima	a) Terlaksananya koordinasi pengembangan pelayanan dari satu atap menjadi satu pintu b) <i>Terlaksananya evaluasi terhadap peningkatan pelayanan prima yang telah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan peningkatannya.</i>
		3. Pelaksanaan administrasi wilayah	Meningkatnya efisiensi administrasi wilayah kotamadya Jakarta Selatan.
		4. pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah	Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan, Blok M, Kemang (Perkampungan).
		5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan	a) Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan RT/RW dan Kelurahan. b) Terselenggaranya forum warga tingkat RW.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		6. Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kotamadya	Terlaksananya koordinasi Kelurahan Kecamatan dan unit-unit terkait di wilayah dalam pelimpahan kewenangan.
7. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Timur	1. Pembinaan aparatur Walikotamadya	a) Terlaksananya pembinaan aparatur wilayah terutama untuk Kecamatan dan Kelurahan. b) <i>Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang bebas KKN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diukur dengan menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dimaksud.</i>
		2. Peningkatan pelayanan prima	a) Terlaksananya koordinasi pengembangan pelayanan dari satu atap menjadi satu pintu b) <i>Terlaksananya evaluasi terhadap peningkatan pelayanan prima yang telah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan peningkatannya.</i>
		3. Pelaksanaan adminstrasi wilayah	Meningkatnya efisiensi administrasi wilayah Kotamadya Jakarta Timur.
		4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah	a) Terlaksananya pembangunan terminal pengganti Pulogadung. b) Meningkatnya sarana dan prasarana kawasan Pulogadung. c) Terlaksananya koordinasi penataan jalan sejajar sisi selatan Pondok Kopi pintu tol Bintara.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			d) Meningkatnya kawasan Jatinegara dan Banjir Kanal Timur.
		5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan	a) Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan RT/RW dan Kelurahan. b) Terselenggaranya forum warga tingkat RW.
		6. Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat kodya Jakarta Timur.	Terlaksananya koordinasi Kelurahan Kecamatan dan unit-unit terkait di wilayah dalam pelimpahan kewenangan.
8. Pengembangan Pemerintahan wilayah kotamadya dan kabupaten Kepulauan Seribu	Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Kab. Adm. Kep. Seribu.	1. Pembinaan aparatur wilayah	a) Terlaksananya pembinaan aparatur wilayah terutama untuk Kecamatan dan Kelurahan. b) <i>Meningkatnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang bebas KKN di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang dapat diukur dengan menurunnya keluhan masyarakat terhadap pelayanan dimaksud.</i>
		2. Peningkatan pelayanan masyarakat	a) Terlaksananya koordinasi pengembangan pelayanan dari satu atap menjadi satu pintu b) <i>Terlaksananya evaluasi terhadap peningkatan pelayanan prima yang telah dilakukan dalam rangka mengukur tingkat efektivitas dan peningkatannya.</i>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Pelaksanaan administrasi wilayah	Meningkatnya efisiensi administrasi wilayah Kabupaten Kep Seribu.
		4. Pelaksanaan koordinasi pembangunan tingkat wilayah	Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
		5. Pembinaan lembaga kemasyarakatan	a) Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan RT/RW dan Kelurahan. b) Terselenggaranya forum warga tingkat RW.
		6. Pengkoordinasian pelimpahan kewenangan tingkat Kab. Kep Seribu	Terlaksananya koordinasi Kelurahan, Kecamatan dan unit-unit terkait di wilayah dalam pelimpahan kewenangan.
9. Penataan Administrasi Pertanahan	a) Terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang baik	1. Peningkatan administrasi pertanahan di DKI Jakarta	a) Terlaksananya pensertifikasian tanah secara massal sebanyak 5.000 Sertifikat. b) Terlaksananya penyuluhan tentang pengurusan, penguasaan, peruntukan dan peralihan hak atas tanah sebanyak 2 kali. c) Terlaksananya evaluasi terhadap rekomendasi SIPPT yang telah diterbitkan.
		2. Penyuluhan dan pembinaan masyarakat di bidang pertanahan	a) Terlaksananya sosialisasi pertanahan tentang land-reform dan konsolidasi tanah perkotaan sebanyak 2 kali.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			b) Terlaksananya kerjasama antar lembaga yang terkait dengan pertanahan dan pemetaan.
		3. Pengkajian dan Penerapan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan	a) Terlaksananya penyelesaian masalah sengketa pertanahan (non peradilan). b) Tersusunnya juklak/juknis pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tata guna tanah. c) Tersusunnya rencana umum persediaan tanah dan tataguna tanah.
	b) Adanya kejelasan status seluruh lahan milik Pemerintah Daerah.	Pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah	a) Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah. b) Terlaksananya pengamanan asset tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah. c) Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang standarisasi biaya operasional pelaksanaan pengukuran dan pematokan batas asset tanah milik Pemerintah Daerah. d) Terlaksananya optimalisasi pola penggunausahaan asset Daerah.
APARATUR			
1. Pengembangan SDM Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan	1. Pengembangan kompetensi dan pembinaan pegawai.	a) Tersusunnya Rumusan Standar Kompetensi Spesifik pada Unit Kerja (Dinas, Biro, Badan dan Kantor). b) Terlaksananya Koordinasi Penerapan Standar dalam Kompetensi pada Unit Kerja. c) Tersedianya penyusunan CBHRM Kelurahan, BKD, Diklat dan Bapeda.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			<p>d) Terbentuknya pola recruitment, pendayagunaan dan penempatan pegawai sesuai kompetensi.</p> <p>e) Tersedianya sistem promosi dan mutasi jabatan yang obyektif dan transparant.</p> <p>f) Tersusunnya instrumen kinerja berdasarkan kompetensi.</p>
		2. Pengembangan SDM Kecamatan dan Kelurahan	Tersedianya kebijakan penambahan jumlah SDM Kelurahan dan Kecamatan.
2. Peningkatan Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya mekanisme administrasi kepegawaian yang lebih baik	1. Pengembangan dan pengelolaan SI Kepegawaian	Terlaksananya pemutakhiran database SIMPEG.
		2. Penyusunan kebijakan dan penyempurnaan peraturan kepegawaian	Tersusunnya kebijakan dan peraturan kepegawaian dalam rangka pelimpahan kewenangan
		3. Pengelolaan kesra pegawai	Tersusunnya sistem insentif secara variabel yang mampu meningkatkan kinerja pegawai
		4. Pengelolaan administrasi kepegawaian	Tersusunnya sistem administrasi kepegawaian yang efisien
3. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Meningkatnya keterampilan aparatur	1. Pengembangan diklat berbasis kompetensi.	<p>a) Tersusunnya kurikulum dan modul diklat berbasis kompetensi melalui analisis kebutuhan diklat.</p> <p>b) Tersedianya data kebutuhan diklat berdasarkan kompetensi untuk setiap jabatan.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			c) Tersedianya instrumen evaluasi pembelajaran berbasis kompetensi. d) Meningkatnya kemampuan widyaiswara dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi.
		2. Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelimpahan kewenangan	a) Terlaksananya pelatihan perencanaan pengelolaan keuangan pelaksanaan kegiatan bagi aparat Kelurahan dan Kecamatan sebanyak masing-masing 2 orang. b) Terlaksananya pelatihan pelimpahan kewenangan bagi aparat unit-unit terkait.
		3. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang representatif.	Tersedianya sarana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan sistem pembelajaran berbasis kompetensi.
		4. Peningkatan kapasitas diklat.	a) Terlaksananya bantuan kepada unit dalam pelaksanaan diklat teknis substantif. b) Meningkatnya kerjasama dengan lembaga luar dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. c) Meningkatnya kualitas widyaiswara.
4. Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan	Tersusunnya uraian jabatan perangkat daerah	1. Penataan Organisasi Perangkat Daerah.	Tersusunnya Tugas dan Fungsi Setdaprop, Setwan, Dinas Daerah, Badan, Kantor Kodya/Kab.Adm, Kecamatan dan Kelurahan.
		2. Penataan tata laksana Pelayanan Umum.	Tersusunnya Pedoman Tata Kerja dan Pelayanan Umum.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Pengembangan Jabatan Fungsional	Terbentuknya Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah.
		4. Pengembangan organisasi dan perangkat pelimpahan kewenangan	a) Tersusunnya mekanisme kerja yang aplikatif dan kredible dalam pelimpahan kewenangan. b) Tersedianya pola koordinasi antar unit dalam pelimpahan kewenangan.
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN			
1. Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana	a) Tersusunnya perencanaan daerah yang mampu menampung hasil pemikiran masyarakat	1. Peningkatan kualitas perencanaan;	a) Terselenggaranya forum perencanaan berjenjang. b) Tersusunnya pedoman perencanaan yang baku. c) Terwujudnya sistem informasi perencanaan propinsi dan terintegrasi di lima wilayah (<i>on line system</i>).
		2. Perencanaan kebijakan tahunan daerah;	a) Tersusunnya Repetada. b) Tersedianya SIM berbasis E-government.
		3. Pengembangan perencanaan 8 bidang pembangunan;	a) Tersusunnya rencana tahunan 8 bidang yang saling terkait dan tidak tumpang tindih satu dengan lainnya . b) Tersedianya master plan pemberdayaan masyarakat. c) Terwujudnya koordinasi pembangunan fasilitas di kawasan khusus.
		4. Penyusunan rencana APBD;	Tersusunnya rencana pembangunan antar wilayah.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		5. Koordinasi dan Pengembangan perencanaan terpadu (lintas sektor dan lintas wilayah)	a) Tersedianya hasil perencanaan yang integratif dan komprehensif. b) Tersedianya kajian dan evaluasi dokumen kerjasama antar daerah dan antar kota.
		6. Penyusunan rencana tindak (action plan) fungsi-fungsi strategis	Tersusunnya dokumen rencana tindak (<i>action plan</i>) fungsi-fungsi strategis.
	b) Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan daerah	Pengendalian dan pengawasan perencanaan 8 bidang pembangunan.	a) Tersedianya hasil laporan evaluasi perencanaan 8 bidang pembangunan yang juga dapat diakses oleh publik melalui website Pemda DKI Jakarta. b) Tersedianya laporan perencanaan secara periodik.
2. Penelitian dan Pengembangan	a) Tersusunnya perencanaan pembangunan yang lebih terarah karena didasari oleh penelitian dan pengembangan.	1. Pengembangan kerjasama antara Pemprop DKI dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Riset;	Tersusunnya hasil penelitian/kajian perencanaan.
		2. Pengembangan SDM Perencana	Terlatihnya SDM di bidang perencanaan
	b) Meningkatnya kemudahan pencarian referensi bagi penelitian dan pengembangan	1. Pengembangan penelitian 8 bidang pembangunan	Terkoordinasinya kegiatan penelitian di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
		2. Penataan dan pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan daerah	a) Tersusunnya sistem informasi hasil penelitian dan hasil-hasil pembangunan. b) Tersusunnya pengarsipan.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
3. Peningkatan Pengawasan Fungsional	a) Terciptanya mekanisme check and balances dalam pelaksanaan pemerintahan	Peningkatan Pengawasan/ Pemeriksaan Reguler	<i>Tersedianya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan reguler dan evaluasi tindak lanjutnya serta disampaikan ke DPRD sewaktu-waktu diminta.</i>
	b) Meningkatnya penyelesaian kasus KKN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Kasus KKN	Tersedianya data hasil-hasil penanganan kasus KKN.
	c) Meningkatnya jumlah unit kerja/dinas yang melaksanakan akuntabilitas kerjanya	1. Pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional Auditor	a) Terlaksananya Diklat Fungsional Auditor 73 orang. b) Meningkatnya kemampuan teknis pemeriksaan aparat Bawasda.
2. Peningkatan Pembinaan/Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta		a) Terlaksananya penilaian akuntabilitas kinerja unit. b) Terlaksananya evaluasi mekanisme pelaporan AKIP. c) Terselenggaranya sosialisasi penyusunan LAKIP untuk unit kerja.	
4. Peningkatan Kerjasama antar Daerah	Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang harmonis antar kota dan daerah di dalam dan luar negeri	1. Peningkatan program kerjasama Sister City	a) Terlaksananya koordinasi program kerjasama <i>Sister City</i> . b) Terlaksananya pengukuhan kerjasama SC Jakarta-Hanoi dan Jakarta-Athena.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan program kerjasama antar daerah luar negeri dan dalam negeri serta lembaga	a) Terlaksananya koordinasi program kerjasama Jabodetabekjur. b) Terlaksananya koordinasi program kerjasama bilateral dengan Kab. Garut, Kab. Subang, Kab. OKI dan Bungo, Kab. Tapus, Tobasa dan Dairi. c) Terlaksananya koordinasi program kerjasama MPU. d) Terlaksananya koordinasi program kerjasama lembaga/forum Raker APPSI 2005, APAKSI, APEKSI. e) Terlaksananya koordinasi program kerjasama internasional melalui keikutsertaan ANMC 21, Kongres UCLG ASPAC dan forum Metropolis. f) Terlaksananya koordinasi pelayanan terhadap <i>Corps Diplomatic</i> (CD) negara-negara sahabat. g) Terlaksananya koordinasi penyiapan fasilitas pemanfaatan bantuan luar negeri/hibah. h) Terlaksananya evaluasi dan penyusunan data terhadap program-program kerjasama bilateral/multilateral.
5. Peningkatan Perbendaharaan Daerah	Terciptanya sistem perbendaharaan daerah yang tertib, transparan dan efektif.	1. Peningkatan kegiatan Pelayanan penerimaan dan pengeluaran daerah	Terwujudnya pelayanan yang mudah dan tepat sasaran.
		2. Peningkatan pengolahan data dan informasi	Terciptanya mekanisme kerja yang didukung oleh teknologi informasi.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Evaluasi Pengembangan kesisteman/program	Terciptanya informasi yang akurat tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah.
		4. Pengendalian sistem informasi realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah	Terwujudnya data realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah
		5. Pengendalian administrasi penerimaan uang daerah dan optimalisasi dana daerah	Terciptanya optimalisasi dana daerah
		6. Peningkatan administrasi penerbitan surat perintah membayar yang membebani APBD	Terwujudnya pelayanan penerimaan yang lebih baik
6. Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah	a) Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.	1. Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah	Tersusunnya pelaksanaan manajemen Keuangan Daerah
		2. Penyempurnaan Sistem Keuangan Daerah	a) Tersusunnya neraca Keuangan Daerah. b) Tersusunnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. c) Tersusunnya SIMKEU Daerah. d) Pengakutansian dan penyusunan perhitungan anggaran dan LPJ.
	b) Berkurangnya keluhan terhadap pengelolaan/pelayanan administrasi keuangan daerah	Peningkatan proses dan mekanisme kerja pelayanan administrasi Keuangan Daerah.	a) Terlaksananya adm. Pengesahan dokumen SPJ. b) Tersusunnya bahan perencanaan penyusunan dan penetapan serta perubahan APBD.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
7. Peningkatan Penerimaan Daerah			c) Terlaksananya pemantauan likuiditas kas terhadap ketersediaan Dana Daerah. d) Tersusunnya sistem pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah. e) Terbinanya SDM Pengelola Keuangan Daerah. f) Terlaksananya sistem monitoring keuangan daerah.
	a) Tercapainya penerimaan daerah yang optimal guna pelaksanaan pembangunan.	1. Peningkatan sosialisasi, penyuluhan dan partisipasi masyarakat.	a) Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi Daerah. b) Terciptanya partisipasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pemungutan pendapatan daerah. c) Terlaksananya pelatihan auditor bagi aparat.
		2. Peningkatan pelayanan pemungutan pajak daerah	a) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat yang terkait dengan pendapatan daerah. b) Tersusunnya sistem online pemungutan pajak.
	b) Tersusunnya suatu sistem dan pola penerimaan daerah yang efektif dan efisien	1. Peningkatan pengawasan pemungutan pendapatan daerah	Terwujudnya kegiatan pengawasan pemungutan pendapatan daerah.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan tertib administrasi dan sistem informasi pendapatan daerah	Terciptanya peningkatan kegiatan tertib administrasi dan sistem informasi pendapatan daerah.
		3. Peningkatan penagihan pendapatan daerah.	a). Terwujudnya peningkatan penagihan pasif dan aktif terhadap tunggakan pendapatan daerah. b). Tercapainya target pendapatan tahun 2005.
	c) Terjadinya perubahan struktur pendapatan daerah yang lebih sehat	Peningkatan koordinasi pemungutan pendapatan daerah	Terwujudnya peningkatan kegiatan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pemungutan pendapatan daerah.
8. Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah	a) Tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah dan didukung dengan data yang valid serta akurat	1. Pengembangan Sistem Informasi Asset Daerah	a) Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah (bergerak dan tidak bergerak) yang dapat diakses masyarakat umum. b) Terselenggaranya Sistem Informasi Historis Fasos Fasum. c) Tersusunnya daftar inventaris asset daerah yang lengkap, informatif dan memudahkan pengawasan dan pengamanannya.
		2. Penyusunan kebutuhan dan pengadaan barang daerah	a) Tersusunnya standarisasi Barang. b) Tersusunnya standarisasi Harga Barang. c) Tersusunnya standardisasi kebutuhan barang daerah. d) Tersedianya barang daerah yang terpusat.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Penatausahaan Aset-aset Daerah	a) Terlaksananya pemutakhiran dokumentasi aset daerah. b) Terlaksananya sertifikasi Aset daerah. c) Terlaksananya penyelesaian masalah tanah dan bangunan.
	b) Terintegrasinya kewenangan pengelolaan kawasan khusus antara Pusat dan daerah	1. Peningkatan Keterpaduan Pengelolaan Kawasan Khusus antara Pemerintah Pusat dan Daerah	a) Terlaksananya koordinasi pengelolaan kawasan khusus antara pemerintah pusat dan daerah. b) Terlaksananya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan asset. c) Terinventarisasinya masalah tanah dan bangunan yang diserahkan.
SISTEM INFORMASI			
1. Pengembangan Statistik Daerah	a) Tersedianya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat b) Terpenuhinya kebutuhan data untuk penyusunan kebijakan, program dan evaluasi pembangunan.	Meningkatkan pelayanan dan kemudahan akses atas informasi statistik DKI Jakarta Mengembangkan statistik daerah yang mendukung perencanaan APBD dan peningkatan PAD.	Tersedianya data dan informasi statistik dalam berbagai bentuk media yang mudah diakses <i>khususnya bagi publik melalui website Pemda DKI Jakarta.</i> Terpenuhinya kebutuhan data untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan perencanaan APBD dan peningkatan PAD.
2. Pengembangan Teknologi Informasi	a) Terciptanya sistem database/elektronik yang terpadu yang mudah diakses masyarakat	1. Pembangunan dan Pengintegrasian Berbagai Sistem Informasi yang ada di Pemda Propinsi DKI Jakarta	Terwujudnya SIM Terpadu lintas bidang

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Pembangunan Sistem Informasi yang berbasis web	Terwujudnya SIM Terpadu yang berbasis Web
	b) Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memacu manajemen pemerintahan yang lebih modern	1. Pemutakhiran Database Informasi Pemerintahan Daerah	Tersedianya informasi pemerintah daerah yang mutakhir.
		2. Optimalisasi Perangkat Keras dan Perangkat Jaringan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.	Terlaksananya kegiatan perangkat keras dan perangkat jaringan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara optimal.
		3. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah	a) Tersusunnya Rencana Implementasi Masterplan Teknologi Informasi. b) Tersusunnya pedoman pelaksanaan pengembangan IT masing-masing unit. c) Terlaksananya pembentukan Teknologi Informasi Steering Committee dan Project Management Office. d) Terlaksananya Pelatihan SDM IT sebanyak 20 Unit.
3. Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi	Meningkatnya kemudahan akses serta pencarian arsip dan dokumentasi yang diperlukan	1. Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan daerah	a) Terlaksananya bimbingan teknis bidang kearsipan terhadap unit satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. b) Terlaksananya penilaian arsip inaktif dalam rangka penyusutan arsip. c) Terlaksananya penilaian arsip statis dalam rangka penyelamatan bahan pertanggung jawaban daerah. d) Terlaksananya operasional sistem informasi kearsipan daerah.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan sumber daya manusia di bidang kearsipan	a) Terlaksananya pelatihan terhadap profesi/fungsional kearsipan. b) Terlaksananya penyuluhan bidang kearsipan.
		3. Peningkatan pengelolaan naskah sumber arsip	a) Tersedianya naskah sumber arsip. b) Tersedianya dokumen kearsipan.
4. Pengembangan Kehumasan dan Keprotokolan	Terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1. Penyajian dan pengolahan data dan informasi	a) Tersedianya data dan informasi kebijakan, program, dan hasil pembangunan daerah. b) Terlaksananya klarifikasi berita media secara tepat dan akurat. c) Tersusunnya rekaman dan analisa terhadap opini publik.
		2. Sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah	a) Terlaksananya peliputan pada media massa. b) Terlaksananya wawancara dan dialog dengan pemberitaan yang obyektif. c) Terlaksananya kemitraan kerjasama dengan media massa dan asosiasi pers.
		3. Peningkatan pelayanan informasi publik	a) Terlaksananya penerbitan majalah internal sebanyak 12 edisi. b) Terlaksananya operasional media on line warta DKI "berita Jakarta.com"

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			<p>c) Terlaksananya kerjasama kegiatan informasi publik dengan media elektronik seperti radio dan TV dalam penyebaran informasi langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.</p>
		<p>4. Peningkatan pelayanan keprotokolan</p>	<p>a) Terlaksananya kegiatan keprotokolan pimpinan daerah serta pelayanan tamu dan perjalanan dinas. b) Terlaksananya evaluasi kegiatan keprotokolan pimpinan daerah.</p>
<p>5. Pemetaan dan Informasi Pertanahan</p>	<p>Terciptanya sistem pemetaan dan informasi pertanahan daerah yang baik dan berguna bagi pembangunan daerah.</p>	<p>1. Peningkatan sistem informasi manajemen pertanahan</p>	<p>a) Terlaksananya pendataan P4T di 50 Kelurahan b) Tersusunnya sistem informasi pertanahan sebagai pendukung program BKT yang dapat diakses oleh publik melalui website Pemda DKI Jakarta.</p>
		<p>2. Pengembangan Pemetaan Geografis dan aplikasi</p>	<p>a) Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan peta dasar Jakarta b) Tersusunnya peta tematik sebagai pendukung monorel c) Terlaksananya pengukuran potensi kelautan</p>
		<p>3. Pengembangan Pengukuran Rekayasa</p>	<p>Terlaksananya pelayanan pengukuran jaringan utilitas</p>

C. BIDANG EKONOMI

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan di bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui perbaikan infrastruktur dan kemudahan akses sumber daya ekonomi, dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mewujudkan dan memperkuat basis ekonomi melalui penguatan jaringan produksi dan distribusi, peningkatan peranserta usaha mikro, UKM dan koperasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan daya saing produk. Disamping itu juga diarahkan untuk meningkatkan kontribusi PD/BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Strategi

- a) Mengembalikan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap kehidupan ekonomi DKI Jakarta dengan mengembangkan kebijakan yang pro pasar, membangun infrastruktur ekonomi yang memadai, menekan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) dan menciptakan sistem pelayanan investasi yang lebih sederhana untuk mencapai peningkatan investasi.
- b) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- c) Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan dengan membangun sektor-sektor unggulan dan meningkatkan peranan sektor-sektor yang non unggulan dengan memperhatikan dampaknya pada kehidupan sosial dan lingkungan hidup serta sebesar-besarnya bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja.

3) Program dan Kegiatan Prioritas:

- a) Pengembangan Produk Pariwisata, dengan kegiatan : (1) Penyusunan Master Plan Pariwisata DKI Jakarta, (2) Peningkatan Pengembangan Produk Pariwisata.
- b) Pengembangan Pasar Pariwisata, dengan kegiatan : (1) Pengembangan Pemasaran Kepariwisata (2) Penyelenggaraan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri.
- c) Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata, dengan kegiatan : (1) Peningkatan sarana dan pelayanan kepariwisataan, (2) Sosialisasi produk hukum, (3) Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata, (4) Pengembangan kebijakan kepariwisataan, (5) Pengembangan SDM Profesi Pariwisata.
- d) Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan, dengan kegiatan : (1) Pengembangan Usaha Industri dan Perdagangan, (2) Pengkajian sentra industri kecil DKI Jakarta, (3) Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri dan perdagangan, (4) Pengembangan industri dan perdagangan bersifat non polusi, hemat air dan berteknologi, (5) Peningkatan Pelayanan di bidang industri dan perdagangan, (6) Pemutakhiran informasi industri dan perdagangan yang terkini melalui website.
- e) Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan (IKDK), (2) Pengkajian strategi Pengembangan industri se Jabodetabek, (3) Pengkajian industri prioritas, (4) Pengembangan Kemitraan antara Usaha Besar dan Kecil, (5) Penyertaan lembaga keuangan non Bank dalam kemitraan usaha, (6) Pengkajian strategis tentang hak-hak Pemprop. DKI Jakarta dalam kebijakan di sektor industri dan perdagangan dalam rangka otonomi daerah, (7) Pengawasan kemitraan usaha besar, kecil, industri hulu dan hilir, (8) Pengembangan

kerjasama antara sentra-sentra industri dengan pengusaha, Asosiasi dan KADIN.

- f) Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan, dengan kegiatan : (1) Pengawasan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, (2) Peningkatan penerapan standarisasi mutu barang yang beredar.
- g) Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan : Pengembangan promosi dalam dan luar negeri.
- h) Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan), dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kinerja PD/BUMD/PT Patungan, (2) Pengembangan Usaha Daerah/BUMD/PT Patungan
- i) Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang kemudahan Investasi, (2) Penyusunan tata cara penanaman modal, (3) Penyediaan akses pasar PD/BUMD/PT Patungan.
- j) Pemberdayaan Aset Daerah, dengan kegiatan : peningkatan pemanfaatan asset daerah.
- k) Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro, dengan kegiatan : (1) Peningkatan sarana usaha dan permodalan serta teknologi, (2) Pengawasan dan pengendalian Usaha Kaki Lima, (3) Penataan dan pembinaan pedagang K5 dan usaha skala mikro.
- l) Pemberdayaan UKM dan Koperasi, dengan kegiatan : (1) Peningkatan dan Pengembangan UKM, (2) Revitalisasi dan pendampingan Koperasi-Pemutahiran data KUKM, (3) Peningkatan kemitraan usaha, (4) Pemberdayaan Koperasi, (5) Peningkatan Pelayanan Koperasi
- m) Pengembangan Kewirausahaan, dengan kegiatan : peningkatan kewirausahaan KUKM

- n) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, dengan kegiatan : pengembangan KSP/USP, (2) Pembangunan Sistem Pengelolaan Penjamin Kredit
- o) Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kesehatan Hewan Ternak dan Ikan, (2) Peningkatan operasional kesehatan hewan dan ikan, (3) Pengelolaan ekologi dan pengembangan teknologi peternakan, (4) Pengelolaan ekologi kawasan pemotongan hewan, (5) Pengembangan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan, (6) Pengembangan produksi peternakan dan perikanan, (7) Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan, (8) Pengembangan produksi perikanan, (9) Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan.
- p) Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan usaha, pemasaran dan kemitraan peternakan dan perikanan, (2) Peningkatan pelayanan dan pengawasan kesmavet, (3) Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan pengujian laboratorium kesmavet, (4) Diseminasi Informasi pasar (kuantitas, kualitas dan harga), (5) Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan pengujian laboratorium mutu ikan dan hasil olahannya, (6) Peningkatan pembinaan masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan.
- q) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, dengan kegiatan : (1) Konservasi, eksploitasi, eksplorasi dan rehabilitasi sumber daya laut, (2) Pengembangan ketrampilan SDM masyarakat perikanan (penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan).
- r) Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan, dengan kegiatan : (1) Pengembangan usaha dan Pemasaran, (2) Peningkatan mutu dan keamanan pangan, (3) Peningkatan produksi dan perlindungan tanaman, (4) Peningkatan SDM bidang Pertanian, (5) Peningkatan pengawasan dan peredaran hasil pertanian kehutanan

- s) Pengembangan Kehutanan, dengan kegiatan : (1) Pelestarian dan pengembangan kawasan hutan, (2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi illegal logging, (3) Pengembangan dan Perluasan RTH, (4) Peningkatan SDM bidang Kehutanan, (5) Peningkatan sarana dan prasarana satwa, (6) Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Satwa, (7) Peningkatan Kuantitas Satwa Langka dan Pengembalian Satwa ke Habitatnya, (8) Pengkajian kelembagaan untuk pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan.

4) Matriks Indikator Bidang Ekonomi

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
PARIWISATA			
1. Pengembangan Produk Pariwisata	a) Tersedianya Master Plan kebijakan sektor pariwisata DKI Jakarta	Penyusunan Master Plan Pariwisata DKI Jakarta	a) Tersedianya Rencana induk Pengembangan Pariwisata b) Tersedianya rencana pengembangan kawasan khusus wisata bahari Kepulauan Seribu.
	b) Meningkatnya jumlah serta kualitas produk/obyek wisata	Peningkatan Pengembangan Produk Pariwisata	a) Terselenggaranya penilaian Adikarya Wisata (1 kali) b) Terselenggaranya Atraksi Pariwisata Unggulan sebanyak 6 kali sesuai dengan 6 produk unggulan (shopping, dining, nightlife, golf, spa, dan wisata bahari) c) Terselenggaranya Kampanye/Sosialisasi Brand Pariwisata 2 kali d) Terlaksananya Patroli Polisi Pariwisata di 5 Kotamadya. e) Terselenggaranya Kampanye Sadar Wisata 5 Kelompok Masyarakat. f) Tersedianya perencanaan dan pengembangan penataan kawasan Pasar Baru, Kota Tua, dan PIK Pulogadung serta 5 wilayah Kotamadya dan Kep. Seribu.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			g) Terselenggaranya atraksi budaya unggulan 15 kali di Anjungan Propinsi DKI Jakarta, TMII dan Sangkrini. h) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan industri pariwisata.
2. Pengembangan Pasar Pariwisata	a) Tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk buletin, brosur, video serta media internet	Pengembangan Pemasaran Kepariwisata	a) Tersedianya leaflet, buletin, brosur di tempat-tempat strategis secara berkala dalam jumlah yang memadai serta meningkatnya promosi melalui media cetak/elektronik. b) Terselenggaranya pemutakhiran Web Site dan info box layar sentuh pariwisata serta pusat informasi pariwisata yang aksesabel.
	b) Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Penyelenggaraan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	Terselenggaranya Promosi Pariwisata di dalam negeri 10 kali dan luar negeri 15 kali dalam bentuk road show, pameran pariwisata dan Forum Organisasi Pariwisata, baik skala internasional maupun nasional.
3. Pengembangan Sarana dan Pelayanan Pariwisata	a) Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata	1. Peningkatan sarana dan pelayanan kepariwisataan	a) Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana Kantor Dinas Pariwisata, Graha Wisata. b) Terselenggaranya kemitraan masyarakat pariwisata (Biro Perjalanan/Asosiasi) untuk pengembangan obyek wisata bahari.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Sosialisasi produk hukum	Tersosialisasinya produk hukum kepariwisataan
		3. Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata	Terselenggaranya tertib kegiatan usaha pariwisata
		4. Pengembangan kebijakan kepariwisataan	a) Tersedianya produk hukum kepariwisataan b) Tertatanya kawasan unggulan pusat jajanan malam di Jakarta Pusat
	b) Meningkatnya pelayanan yang bermutu menurut standar internasional di kepariwisataan	Pengembangan SDM Profesi Pariwisata	Terselenggaranya pelatihan tenaga kerja profesi pariwisata 200 orang
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN			
1. Penataan dan Penguatan Basis Industri dan Perdagangan	a) Meningkatnya nilai tambah sektor industri dan perdagangan	1. Pengembangan Usaha Industri dan Perdagangan	a) <i>Terfasilitasinya sertifikasi ISO 9001:2000 untuk minimal 10 Perusahaan Industri Logam, Mesin, Elektronika Aneka</i> b) Terlaksananya Kajian regulasi dan kebijakan sektor industri dan perdagangan.
		2. Pengkajian sentra industri kecil DKI Jakarta	Tersedianya kajian tentang industri kecil di Jakarta
	b) Meningkatnya usaha industri yang ramah lingkungan	1. Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri dan perdagangan.	a) Terlaksananya kampanye industri yang berwawasan lingkungan sebanyak 6 kali. b) Terlaksananya pemberian penghargaan Kalpataru sebanyak 5 Perusahaan.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Pengembangan industri dan perdagangan bersifat non polusi, hemat air dan berteknologi.	Tersedianya data usaha-usaha industri ramah lingkungan dan pencemar lingkungan
	c) Terwujudnya pelayanan prima sesuai standar internasional	1. Peningkatan Pelayanan di bidang industri dan perdagangan	a) Tersedianya SDM yang menguasai sistem komputerisasi 45 orang. b) Tersosialisasinya sistem pelayanan prima sesuai standar internasional. c) Tersedianya SDM kemetrologian sebanyak 30 orang.
		2. Pemutakhiran informasi industri dan perdagangan yang terkini melalui website	Tersedianya data industri dan perdagangan yang akuntabel
2. Penataan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan	a) Meningkatnya keanekaragaman produk industri	1. Peningkatan dan Pengembangan Produk Industri dan Perdagangan (IKDK)	a) Terlaksananya pelatihan bagi 50 pengusaha IKDK dalam pengembangan produk b) Terdaftaranya Merk Industri makanan/minuman
		2. Pengkajian strategi Pengembangan industri se-Jabodetabek	Tersedianya pola pengembangan industri di wilayah JABODETABEK
		3. Pengkajian industri prioritas	Tersedianya kajian industri unggulan
	b) Meningkatnya partisipasi masyarakat, UKM dan investasi swasta dalam pengembangan industri dan perdagangan	1. Pengembangan Kemitraan antara Usaha Besar dan Kecil	a) Terlaksananya temu usaha antara usaha industri besar dengan industri kecil dua kali. b) Tersusunnya mekanisme Kerja antara Industri Besar dan Kecil. c) Tersedianya Perda tentang Kemitraan antara Usaha Besar dan Kecil.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Penyertaan lembaga keuangan non Bank dalam kemitraan usaha.	Tersedianya lembaga keuangan non bank yang membantu permodalan bagi UKM.
		3. Pengkajian strategis tentang hak-hak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam kebijakan di sektor industri dan perdagangan dlm rangka otonomi daerah.	Tersedianya kajian tentang hak-hak Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam membina sektor industri dan perdagangan
	c) Terciptanya sistem usaha industri yang saling mendukung antara industri hulu dan industri hilir	Pengawasan kemitraan usaha besar, kecil, industri hulu dan hilir	<i>Tersusunnya mekanisme kemitraan antar Industri Kecil Menengah</i>
	d) Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah melalui pengembangan sentra-sentra industri	Pengembangan kerjasama antara sentra-sentra industri dengan pengusaha, Asosiasi dan KADIN.	Terlaksananya Kajian Pengembangan Pola Kerjasama Sentra dengan asosiasi.
3. Penataan Jaringan Distribusi Produk Industri dan Perdagangan	a) Terjaminnya ketersediaan dan kelancaran distribusi barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat	Pengawasan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang.	a) Terlaksananya pasar Lelang Forward Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat DKI Jakarta sebanyak 6 kali. b) Terlaksananya pengawasan ketersediaan barang. c) Terbentuknya tim pengendali stock terutama bahan pangan.
	b) Terjaminnya kualitas barang yang dipasarkan	Peningkatan penerapan standarisasi mutu barang yang beredar.	a) Terbentuknya Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK). b) Terlaksananya pengawasan barang yang beredar sebanyak 10 jenis.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
4. Pengembangan Ekspor	Meningkatnya sumbangan ekspor terhadap perolehan devisa dan PDRB	Pengembangan Promosi Dalam dan Luar Negeri.	a) Terlaksananya Kegiatan Pameran di Luar Negeri sebanyak 3 negara dan Dalam Negeri sebanyak 3 kali. b) Terlaksananya diversifikasi pasar ekspor non tradisional DKI Jakarta.
PENGEMBANGAN USAHA DAERAH			
1. Penataan dan Restrukturisasi Usaha Daerah (PD/BUMD/PT Patungan)	a) Meningkatnya kinerja PD/BUMD/PT Patungan	Peningkatan Kinerja PD/BUMD/PT Patungan	a) Terlaksananya pelatihan teknis SDM PD/BUMD/PT Patungan. b) Terevaluasinya kinerja usaha daerah BUMD.
	b) Meningkatnya pendapatan daerah dari sumber PD/BUMD/PT Patungan	Pengembangan Usaha Daerah/BUMD/PT Patungan	a) Terlaksananya pembentukan Sub Holding Company Keuangan dan Perbankan. b) Terlaksananya penataan Usaha Daerah/BUMD/PT Patungan. c) Terlaksananya pemantauan hasil audit usaha daerah/BUMD/PT Patungan. d) Tercapainya target laba dan setoran laba ke Kas Daerah yang seimbang dengan penyertaan modal yang ditanamkan oleh Daerah.
2. Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal dan Usaha Swasta Lain	Terciptanya kemudahan dalam melakukan kegiatan investasi	1. Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang kemudahan Investasi	a) Tersedianya sarana dan prasarana ruang promosi. b) Terlaksananya promosi investasi c) Tersedianya sistem informasi investasi/pasar.
		2. Penyusunan tata cara penanaman modal.	Tersedianya SK Gubernur tentang tata cara penanaman modal.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Penyediaan akses pasar PD/BUMD/PT Patungan	Tersedianya informasi pasar untuk PD/BUMD/ PT Patungan.
3. Pemberdayaan Aset Daerah	Meningkatnya PAD yang berasal dari pemanfaatan asset daerah	Peningkatan Pemanfaatan Asset Daerah	a) Terlaksananya pemutakhiran data asset yang potensial untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga. b) Tersedianya calon mitra untuk pemberdayaan asset daerah. c) Terevaluasinya pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan asset daerah diikuti dengan tindak lanjut. d) Termonitornya kewajiban pihak ketiga. e) Tersedianya informasi potensi geografi.
USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI			
1. Penataan Kaki Lima dan Usaha Skala Mikro	a) Terciptanya usaha skala mikro yang sehat dan dinamis	Peningkatan sarana usaha dan permodalan serta teknologi	a) Terbentuknya LKM sebanyak 50 LKM. b) Tersedianya sertifikasi usaha skala mikro c) Terlaksananya Pendampingan Manajerial utk usaha skala mikro. d) Terciptanya kerjasama antara pengembang perpasaran swasta dengan PKL.
	b) Tertibnya para pedagang kaki lima	1. Pengawasan dan pengendalian Usaha Kaki Lima	Tersedianya ruang penampungan PKL di perpasaran swasta.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Penataan dan pembinaan pedagang K5 dan usaha skala mikro	a) Tertatanya Usaha Skala Mikro. b) Tertatanya 6 tempat usaha PKL/Lokbin.
2. Pemberdayaan UKM dan Koperasi	a) Meningkatnya akses UKM pada sumber daya produktif terutama permodalan dan pemasaran	1. Peningkatan dan Pengembangan UKM	a) Terwujudnya UKM berprestasi sebanyak 100 UKM. b) Terbangunnya Sistem dan Mekanisme Perdagangan Bersama (Trading House).
		2. Revitalisasi dan pendampingan Koperasi-Pemutahiran data KUKM	a) Terbangunnya 50 koperasi yang sehat b) Tersedianya data KUKM yang akuntabel
		3. Peningkatan kemitraan usaha	Terwujudnya kemitraan usaha kecil dengan menengah dan besar sebanyak 100 UKM
	b) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi koperasi	1. Pemberdayaan Koperasi	Terlaksananya kerjasama Koperasi dengan dunia usaha lainnya.
		2. Peningkatan Pelayanan Koperasi	Terbentuknya 100 koperasi baru.
3. Pengembangan Kewirausahaan	Terciptanya lapangan kerja mandiri	Peningkatan Kewirausahaan KUKM	Terwujudnya 100 wira usaha baru
4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	a) Terselenggaranya penerapan skema kredit usaha kecil yang mendorong akses usaha kecil, menengah dan mikro kepada sumber permodalan.	Pengembangan KSP/USP	Terwujudnya revitalisasi 25 KSP/USP
	b) Tersedianya lembaga penjamin yang handal	Pembangunan Sistem Pengelolaan Penjamin Kredit	Tersedianya Sistem Pengelolaan Penjamin Kredit

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN			
1. Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan	a) Meningkatnya kesehatan hewan ternak	1. Peningkatan Kesehatan Hewan Ternak dan Ikan	a) Menurunnya jenis penyakit hewan dan ikan di DKI Jakarta. b) Tersedianya prasarana sarana penunjang kesehatan hewan dan ikan. c) Terlatihnya SDM kesehatan hewan dan ikan.
		2. Peningkatan operasional pelayanan kesehatan hewan dan ikan	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan hewan dan ikan.
	b) Terpeliharanya sumber daya lingkungan di lokasi peternakan	1. Pengelolaan ekologi dan pengembangan teknologi peternakan	a) Terprosesnya limbah cair dan padat di Pondok Ranggon. b) Terpusatnya kawasan peternakan sapi di Pondok Ranggon. c) Meningkatnya genetik ternak dan bibit unggul ternak. d) Terbangunnya sarana dan prasarana 11 unit. e) Tersedianya 3 unit Hachery kapasitas 10.000 butir. f) Tersedianya bibit unggul 5.000 ekor. g) Meningkatnya SDM teknologi peternakan.
		2. Pengelolaan ekologi kawasan pemotongan hewan.	a) Tersedianya Rumah Pemotongan Hewan Babi di Kapuk yang higienis dengan kapasitas pemotongan 2.000 ekor/hari. b) Tersedianya kajian pengelolaan RPH Kapuk yang ramah lingkungan.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	c) Meningkatnya produksi perikanan darat dan laut	1. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan .	a) Terbangunnya sarana penunjang produksi perikanan di Muara Angke sebanyak 13 jenis. b) Termanfaatkannya secara optimal 36 buah kapal dan meningkatnya kesejahteraan penerima bantuan kapal penangkapan ikan.
		2. Pengembangan Produksi Peternakan dan Perikanan	a) Tersedianya ikan konsumsi sebanyak 4 ton per tahun di Kep. Seribu. b) Tersedianya benih dan induk ikan sebanyak 250.000 ekor di Kepulauan Seribu.
	d) Meningkatnya keanekaragaman produksi dan konsumsi ikan masyarakat	Pengembangan produksi perikanan	a) Tersedianya 2 unit mobil dan peralatan pengangkutan ikan segar. b) Terlaksananya teknologi pengolahan hasil perikanan. c) Tersedianya 2 unit Hatchery ikan. d) Terlaksananya 3 jenis teknologi perikanan
	e) Meningkatnya pemanfaatan teknologi produksi perikanan dan pengolahannya	Pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya jumlah produk olahan hasil perikanan
2. Penataan Distribusi Hasil Peternakan dan Perikanan	a) Meningkatnya Kerjasama antar daerah dalam pengadaan dan penyaluran hewan ternak	1. Peningkatan usaha, pemasaran dan kemitraan peternakan dan perikanan.	Terlaksananya pembinaan kerjasama teknis dan nonteknis dengan daerah penghasil ternak.
		2. Peningkatan pelayanan dan pengawasan kesmavet	a) Terlaksananya pengawasan daging sebanyak 20.000 ton. b) Berkurangnya pemotongan hewan secara liar.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan pengujian laboratorium kesmavet.	a) Tersedianya alat-alat laboratorium kesmavet 20 jenis, cold storage dan kendaraan operasional khusus roda empat. b) Tersedianya pangan asal hewan (daging, telur dan susu) yang aman, sehat dan rekomendasi sertifikat halal.
	b) Terciptanya sistem distribusi hasil-hasil perikanan yang efektif dan efisien	1. Desiminasi Informasi pasar (Kuantitas, Kualitas, dan Harga)	Tersedianya informasi produk perikanan yang mutakhir
		2. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan pengujian laboratorium mutu ikan dan hasil olahannya.	a) Terbangunnya 1 unit gedung laboratorium. b) Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan pengujian mutu ikan dan hasil olahannya
		3. Peningkatan pembinaan masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan.	Meningkatnya pembinaan kepada masyarakat peternakan, perikanan dan kelautan.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut untuk usaha produktif dan pariwisata	1. Konservasi, eksploitasi, eksplorasi dan rehabilitasi sumber daya laut	a) Meningkatnya kualitas terumbu karang sebesar 1 persen dari perairan laut yang ada di Kepulauan Seribu b) Terawasnya ekosistem laut dan pesisir pantai di DKI Jakarta sebesar 30 persen c) Tersusunnya Master Plan kawasan budi daya laut di Kepulauan Seribu. d) Terawasnya ilegal fishing di perairan Kepulauan Seribu.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Pengembangan keterampilan SDM masyarakat perikanan (penangkapan, budidaya dan pengolahan ikan)	Tersedianya SDM pada usaha penangkapan ikan dan pengolahan hasil ikan
PERTANIAN DAN KEHUTANAN			
1. Pengembangan Produksi, Pemasaran Pertanian dan Kehutanan	a) Terselenggaranya pengadaan, distribusi dan penyaluran bahan pangan yang efisien dan efektif	1. Pengembangan usaha dan Pemasaran	a) Terlaksananya Penyelenggaraan kerjasama pelayanan informasi agribisnis dengan instansi dan propinsi terkait 8 Propinsi (3 kali). b) Meningkatnya Jasa pelayanan pertanian dan kehutanan 6 Unit, 20persen. c) Terlaksananya promosi di Dalam Negeri 6 kali. d) Tersedianya perlengkapan Agro outlet Pasar Induk Kramat Jati 16 unit. e) Terlaksananya pembangunan gedung lelang bunga di Rawa Belong 200 M2. f) Terlaksananya penertiban lahan milik Pemda dan pembangunan los kembang 1 unit serta pedagang lama diutamakan. g) Tersedianya perlengkapan gedung lelang di Rawa Belong 15 jenis. h) Terlaksananya pengurusan hak paten 2 produk. i) Tersedianya sarana dan prasarana jasa pelayanan 6 unit.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan mutu dan keamanan pangan	a) Terlaksananya penetapan standarisasi mutu produk pertanian 5 Jenis Produk. b) Terlaksananya penerapan mutu hasil pertanian 6 Jenis Produk. c) Tersedianya peralatan laboratorium uji mutu pangan 4 Laboratorium. d) Tersedianya bahan kimia laboratorium uji mutu pangan 4 Jenis Lab. e) Tersedianya Juklak dan Juknis Perda Mutu dan Keamanan Pangan 10 SK Gubernur. f) Terlaksananya sosialisasi Perda Mutu dan Keamanan Pangan 3 kali. g) Terlaksananya pengembangan teknologi pengolahan hasil 2 jenis.
		3. Peningkatan produksi dan perlindungan tanaman	a) Terlaksananya pengembangan metode kultur In-Vitro 4 komoditi. b) Terlaksananya pengembangan teknologi budidaya tanaman 6 jenis komoditi. c) Terlaksananya pengembangan teknologi pengendalian OPT 6 jenis teknologi. d) Terlaksananya pengembangan pertanian organik dan Bio Pestisida 6 Wilayah. e) Terlaksananya penghijauan produktif di lahan Pemda dan lahan penduduk.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			f) Terlaksananya kerjasama pembibitan dengan 3 propinsi. g) Tersedianya sarana dan Prasarana produksi dan perlindungan tanaman 3 lab, 1 brigade proteksi.
		4. Peningkatan SDM bidang Pertanian	a) Terlatihnya tenaga Teknis Fungsional 10 Jenis. b) Terlaksananya pengembangan wawasan pertanian 2 Lokasi. c) Terlaksananya peningkatan keterampilan Pendidikan Sekolah Pertanian 350 Siswa.
	b) Terkendalinya pemasaran dan konsumsi kayu dan hasil hutan lainnya	Peningkatan pengawasan dan peredaran hasil pertanian kehutanan	a) Terlaksananya kerjasama dan koordinasi pengawasan peredaran hasil hutan dengan instansi terkait 6 kali. b) Terlaksananya Operasi dan Penyelesaian kasus pelanggaran bidang kehutanan 5 Kasus. c) Tersusunnya Juklak Juknis Perda Peredaran Hasil Hutan 3 Sk. Gub, 1 Juklak/Juknis. d) Terlaksananya sosialisasi dan penerapan Perda peredaran hasil hutan 3 kali. e) Tersusunnya standarisasi Mutu Pengawetan Kayu 1 SK. f) Terlaksananya pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian 7 pos.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
2. Pengembangan Hutan	a) Meningkatnya hutan kota dan usaha-usaha konservasi kawasan hutan (hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu)	1. Pelestarian dan pengembangan kawasan hutan	a) Meningkatnya kawasan mangrove Angke Kapuk dan Kepulauan Seribu 30 Ha. b) Meningkatnya luas hutan kota 16 ha c) Meningkatnya areal penghijauan di lokasi RTH 10 Ha. d) Terlaksananya pembangunan wisata agro Cilangkap. e) Terlaksananya pengembangan wisata alam Angke Kapuk dan Kepulauan Seribu f) Terlaksananya refungsionalisasi RTH 3 MOU. g) Terselenggaranya kebersihan lingkungan seluas 50 Ha. h) Terselenggaranya promosi di Media Elektronik dan Cetak sebanyak 5 kali. i) Terselenggaranya pameran sebanyak 4 kali.
		2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi illegal logging	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi illegal logging
	b) Meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) kehutanan	1. Pengembangan dan Perluasan RTH	Terlaksananya pembebasan tanah kantong seluas 22,000M2,
		2. Peningkatan SDM bidang Kehutanan	a) Terlaksananya Pelatihan Teknis Fungsional 3 Jenis. b) Terlaksananya Pengembangan wawasan Kehutanan 2 Lokasi.
	c) Meningkatnya jumlah penangkaran satwa langka	1. Peningkatan sarana dan prasarana satwa	a) Tersedianya master Plan dan Detail Plan 1 paket.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> b) Terselenggaranya Pembangunan dan Peninggian Pagar 4000 m'. c) Terbangunnya Kandang 2 unit. d) Terselenggaranya Rehab kandang 8 unit. e) Terlaksanakanya penurapan kali 1000 m" f) Terselenggaranya rehab water torn timur 1 unit. g) Terbangunnya sarana bermain anak-anak 10 jenis.
		<p>2. Peningkatan Kesejahteraan dan Kesehatan Satwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Terdapatnya Mikro chip dan reader 2600 unit. b) Tersedianya alat Laboratorium 1 paket. c) Tersedianya Obat-obatan satwa 1 paket. d) Tersedianya alat-alat Kedokteran hewan 1 paket. e) Tersedianya Makanan satwa 270 spesies. f) Tersedianya senjata bius 5 buah.
		<p>3. Peningkatan Kuantitas Satwa Langka dan Pengembalian Satwa ke Habitatnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Terselenggaranya perbaikan genetika satwa langka 5 jenis. b) Terselengagranya pelayanan pendidikan dan pelatihan tenaga perawat satwa 4 kali. c) Terselenggaranya pelepasan satwa 2 jenis.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			d) Terselenggaranya Konferensi antar kebun binatang dalam dan luar negeri 3 kali.
		4. Pengkajian kelembagaan untuk pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan	a) <i>Tertatanya manajemen dan pelayanan di TMR.</i> b) Tersedianya hasil kajian tentang pola pengelolaan TMR.

D. BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan dalam pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan adalah meningkatkan kemampuan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka wajib belajar 9 tahun, pemerataan kualitas dan cakupan pendidikan serta pemerataan layanan kesehatan.

2) Strategi

- a) Menciptakan pemerataan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi program pendidikan 9 tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/non fisik pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta.
- b) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyediakan dan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana kesehatan, agar setidaknya mencapai standar minimum pelayanan kesehatan.

3) Program dan Kegiatan Prioritas

- a) Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar, dengan kegiatan : (1) Peningkatan pemerataan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dasar, (2) Penyediaan sistem manajemen pembiayaan bagi masyarakat tidak mampu, (3) Peningkatan peran serta masyarakat, (4) Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar, (5) Peningkatan Kualitas sarana Penunjang Pendidikan Dasar.
- b) Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah dan pendidikan Prasekolah, (2) Peningkatan pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan
- c) Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan, dengan kegiatan : (1) Pemerataan Kesempatan Memperoleh

- Pendidikan sekolah menengah, (2) Peningkatan kualitas sekolah menengah, (3) Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan, (4) Kemampuan daya tampung fisik gedung, (5) Kebijakan tentang peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (6) Peningkatan kualitas sarana penunjang pendidikan dan pemeliharaan, (7) Peningkatan Kualitas 1.272 orang Guru SMU/SMK setara S1, (8) Tindak lanjut hasil uji kompetensi 2.876 orang Guru SMU/SMK
- d) Pengendalian dan Peningkatan Informasi Perguruan Tinggi, dengan kegiatan : peningkatan perumusan kebijakan Pemda berdasarkan hasil penelitian perguruan tinggi
- e) Pengembangan Perpustakaan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Minat Baca Masyarakat, (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan.
- f) Peningkatan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan : (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, (2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular, (3) Perbaikan Gizi Masyarakat, (4) Perbaikan Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja, (5) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Masyarakat, (6) Pelaksanaan Surveilans Penyakit DBD, Malaria, TBC dan flu burung, (7) Pelaksanaan Surveilans Penyakit HIV/AIDS
- g) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar, (2) Peningkatan pelayanan Kesehatan Spesialis, (3) Peningkatan Pelayanan Puskesmas, (4) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, (5) Peningkatan Pelayanan Farmasi Makanan dan Minuman, (6) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.
- h) Penanganan Gawat Darurat, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Pelayanan Siaga Kesehatan, (2) Peningkatan Komunikasi Pelayanan gawat Darurat dan bencana, (3) Peningkatan Pelayanan Satuan tugas, (4) Peningkatan Penyiapan Gawat Darurat dan Bencana.

- i) Perbaiki Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat, (2) Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan.

4) Matriks Indikator Bidang Pendidikan dan Kesehatan

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
PENDIDIKAN			
1. Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Dasar	a) Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar/Murni (APK/M) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) menjadi 100 persen	Peningkatan pemerataan dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Dasar	<p>a) Terlaksananya Identifikasi dan analisa serta penyusunan data penyebab anak putus sekolah (1.187 siswa SD dan 2.263 siswa SMP), termasuk didalamnya anak usia sekolah yang bekerja.</p> <p>b) Tersedianya sarana akses thd informasi mengenai pelayanan pendidikan (3.045 SD dan 922 SMP) yang dapat diakses melalui website dan mutakhir.</p> <p>c) Tersusunnya Perda Sisdikda (Wajar 9 Tahun) yang juga memuat termasuk mekanisme pembiayaan bagi siswa tidak mampu, dewan pendidikan, komite sekolah dan guru perbantuan.</p> <p>d) Tersedianya akses terhadap pembiayaan sekolah bagi masy tidak mampu berupa brosur dan poster di setiap SD dan SMP di bawah Dikdas Propinsi, iklan layanan masyarakat di media elektronik dan media cetak.</p> <p>e) Tersedianya kajian Wajib Belajar 12 tahun.</p> <p>f) Tercapainya Wajib Belajar 9 tahun pada tahun 2005.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Berkurangnya angka putus sekolah siswa SD/MI dan SLTP/MTs .	Penyediaan sistem manajemen pembiayaan bagi masyarakat tidak mampu.	a) Tersedianya biaya operasional bagi 3.967 SD/SMP Negeri/swasta. b) Terlaksananya penyusunan data siswa putus sekolah. c) Terlaksananya kajian Analisa penyebab siswa putus sekolah. d) Terlaksananya pendataan anak usia sekolah yang Bekerja. e) Tersusunnya Perda Perlindungan Anak usia sekolah. f) Terlaksananya optimalisasi penyelenggaraan 33 SMP Terbuka, dan 24 SD wajar serta 1.500 guru kunjung. g) Tersedianya informasi tentang unit cost, alokasi dan rasio pembiayaan pendidikan per siswa.
	c) Meningkatnya peran dan fungsi Komite Sekolah di seluruh SD/MI dan SLTP/MTs	Peningkatan peran serta masyarakat	a) Terselenggaranya peran dan fungsi komite sekolah/Dewan Pendidikan sesuai dengan tupoksi. b) Terlaksananya fasilitasi audit manajemen dan keuangan komite sekolah/ Dewan Pendidikan. c) Tersedianya informasi hasil audit bantuan masyarakat kepada sekolah.
	d) Meningkatnya proporsi guru yang berpendidikan minimal D-2 untuk guru SD/MI dan minimal D-3 untuk guru SLTP/MTs	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	a) Terselenggaranya penyetaraan pendidikan D3 untuk 5.000 guru SD Negeri dan peningkatan pendidikan S1 untuk 1.500 guru SMP Negeri.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			<p>b) Terlaksananya uji kompetensi guru sebanyak 10.000 guru TKN/SDN/SMPN/SLBN.</p> <p>c) Terbinanya kompetensi guru untuk 5.000 dan 2.500 non kependidikan guru TKN/SDN/SMPN/SLBN.</p> <p>d) Terlaksananya pembinaan kurikulum SD/SMP dan KBM untuk 5.000 tenaga kependidikan SD/SMP.</p> <p>e) Terlaksananya pembinaan manajemen pendidikan untuk 5.000 tenaga kependidikan SD/SMP.</p> <p>f) Terciptanya tunjangan kesra dan tunjangan khusus bagi pelaksana pendidikan di sekolah milik Daerah disalurkan melalui Bank dengan dasar hukum Keputusan Gubernur termasuk penerapan sanksinya.</p>
	<p>e) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan prasekolah yang lebih baik</p>	<p>Peningkatan Kualitas sarana Penunjang Pendidikan Dasar</p>	<p>a) Tersedianya buku pegangan guru 6 judul (50.000 eks), buku pokok 6 jdl (1.375.746 eks), buku perpustakaan 26 jdl (100.611 eks), buku penunjang 8 jdl (1.336.950 eks), buku administrasi untuk 3500 sekolah.</p> <p>b) Tersusunnya kebijakan tentang buku pegangan murid untuk 5 tahun.</p> <p>c) Tersedianya alat peraga pendidikan sebanyak 84 jenis (145.260 bh).</p> <p>d) Tersedianya prasarana penunjang perpustakaan sekolah, Laboratorium dan UKS untuk 2.286 SDN dan 286 SMPN.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			e) Terlaksananya rehabilitasi terhadap sarana gedung sesuai dengan hasil evaluasi tim independen.
2. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah	Meningkatnya pengembangan pendidikan sekolah luar biasa	1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Luar Sekolah dan pendidikan Prasekolah	a) Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PAUD. b) Terselenggaranya pembinaan untuk 100 PAUD, 1785 TK, 23 program Kejar Paket A, 22 program Kejar Paket B dan 1500 guru kunjung. c) Tersedianya biaya operasional utk 1.920 lembaga. d) Terlaksananya akreditasi lembaga kursus.
		2. Peningkatan pendidikan luar sekolah bagi anak jalanan	Meningkatnya jumlah peserta pendidikan luar sekolah yang berasal dari anak jalanan
3. Pengembangan Pendidikan Sekolah Tingkat Menengah Umum dan Kejuruan	a) Meningkatnya APK SMU/SMK/ MA	Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sekolah menengah	a) Tersedianya sarana akses terhadap informasi pelayanan pendidikan sekolah menengah. b) Tersedianya biaya sekolah bagi masyarakat tidak mampu. c) Tersusunnya data based siswa miskin SMA/SMK. d) Tersedianya beasiswa bagi siswa SMA/SMK. e) Tersedianya biaya operasional 174 SMA/SMK Negeri.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Meningkatnya mutu pendidikan sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja	Peningkatan kualitas sekolah menengah	a) Tersusunnya standarisasi sekolah menengah bertaraf nasional dan internasional. b) Terlatihnya guru mata pelajaran untuk KBK. c) Terlaksananya akreditasi SMA/SMK.
	c) Meningkatnya daya tampung SMU/SMK/MA	Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan	a) Tersedianya kajian bentuk pengembangan bentuk pendidikan. b) Tersedianya program keahlian seni di SMK.
	d) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SMU/SMK/MA yang lebih baik	Peningkatan kemampuan daya tampung fisik gedung	Tersedianya gedung yang menambah daya tampung dan dilakukannya rehabilitasi terhadap sarana gedung sesuai dengan hasil evaluasi tim independen.
	e) Meningkatnya kualitas pengajar	1. Penyusunan kebijakan tentang peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	Terlaksananya review dan penyempurnaan pedoman penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta dan masyarakat
2. Peningkatan kualitas sarana penunjang pendidikan dan pemeliharaan	a) Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. b) Tersedianya buku pelajaran bagi siswa SMA/SMK. c) Tersedianya Keputusan Gubernur tentang masa pakai buku pegangan bagi SMA/SMK selama 5 tahun.		

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		3. Peningkatan Kualitas 1.272 orang Guru SMU/SMK setara S1	Terselenggaranya peningkatan kualitas guru SMA/SMK setara S1 tahun 2005 = 320 orang, tahun 2006= 240 orang, tahun 2007 = 420 orang .
		4. Tindak lanjut hasil uji kompetensi 2.876 orang Guru SMU/SMK	a) Terlaksananya pembinaan guru sesuai hasil uji kompetensi sebanyak 2.876 orang. b) Terlaksananya uji kompetensi untuk 4.339 guru PNS dan DPK.
4. Pengendalian dan Peningkatan Informasi Perguruan Tinggi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan pemerintah daerah.	Peningkatan perumusan kebijakan Pemda berdasarkan hasil penelitian perguruan tinggi	a) Terlaksananya dukungan kegiatan BEM/UKM PTN dan PTS dalam rangka pengembangan bakat dan minat mahasiswa berupa pendanaan yang besarnya tergantung dari kegiatan yang akan dijalankan dan dana yang tersedia. b) Terlaksananya pembinaan dan penertiban penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
5. Pengembangan perpustakaan	a) Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat	a) Tersusunnya Peraturan Daerah tentang karya cetak dan karya rekam. b) Terlaksananya kajian pengembangan E-Library. c) Terlaksananya social marketing peningkatan minat baca. d) Terlaksananya lomba karya tulis di 5 wilayah Kotamadya dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum yang memadai	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	<p>a) <i>Terpeliharanya koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan umum daerah dan 5 wilayah Kotamadya.</i></p> <p>b) Tersedianya koleksi secara memadai di lima perpustakaan tingkat wilayah Kotamadya terutama buku mengenai moral keagamaan, patriotisme, sains, teknologi, dan manajemen serta ekonomi.</p> <p>c) Tersedianya prasarana yang memadai.</p> <p>d) Meningkatnya perpustakaan keliling ditingkat Kelurahan.</p>
KESEHATAN			
1. Peningkatan Kesehatan masyarakat	a) Meningkatnya prosentase cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	<p>a) Meningkatnya Case Detection rate TBC menjadi 70 persen.</p> <p>b) Meningkatnya Angka Kesembuhan Pengobatan TBC 85 persen.</p> <p>c) Meningkatnya prosentase Kelurahan UCI 100 persen.</p> <p>d) Meningkatnya prosentase BIAS 90 persen.</p> <p>e) Meningkatnya Prosentase Darah PMI Yang dilakukan Screening HIV/AIDS.</p> <p>f) Meningkatnya Case Detection Rate Kusta menjadi 65 persen.</p> <p>g) Meningkatnya cakupan Imunisasi TT menjadi 95 persen.</p> <p>h) <i>Menurunnya IR DBD menjadi 30/100.000 dari 50/100.000</i></p> <p>i) <i>Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan penyakit menular.</i></p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular	a) Tersedianya Puskesmas yang mampu melayani Kasus Narkoba. b) Menurunnya Kunjungan Gangguan Jiwa di Puskesmas dan RS 3 persen. c) Meningkatnya screening penyakit tidak menular utama. d) Meningkatnya koordinasi penanggulangan kesehatan mental secara lintas sektoral.
		3. Perbaiki Gizi Masyarakat	a) Meningkatnya cakupan pemberian Vitamin A pada bayi sebesar 90 persen. b) Meningkatnya cakupan pemberian Vitamin pada Anak Balita sebesar 90 persen. c) Meningkatnya cakupan pemberian tablet tambah darah Fe ₃ pada ibu hamil sebesar 90 persen. d) Meningkatnya status gizi balita dengan D/S sebesar 60 persen . e) Meningkatnya status gizi ibu hamil.
		4. Perbaiki kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja	a) Meningkatnya Keluarga Pengguna Jamban Sehat menjadi 75 persen. b) Meningkatnya Keluarga Pengguna Air Bersih menjadi 80 persen. c) Meningkatnya Keluarga menghuni Rumah Sehat menjadi 60 persen. d) Meningkatnya jumlah Sekolah Sehat menjadi 56 persen. e) Meningkatnya Sarana Kesehatan Sehat (50 persen).

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			f) Meningkatnya Industri kecil Sehat 15 persen. g) Meningkatnya Tempat-tempat Umum Lainnya Sehat 74 persen. h) Meningkatnya RW dengan Jumantik menjadi 40 persen. i) Meningkatnya RW dengan Posko PSN BDB aktif 50 persen. j) Sekolah dengan PSN DBD Aktif 50 persen. k) Berkurangnya jumlah jentik nyamuk. l) Terbentuknya district health council di tingkat Kelurahan. m) Meningkatnya koordinasi program kesehatan lingkungan secara lintas sektoral.
	b) Meningkatnya kualitas petugas pelayanan kesehatan	Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan masyarakat	a) Meningkatnya jumlah Pelatihan berdasarkan program prioritas. b) Prosentase pelatihan pegawai berdasarkan program prioritas.
	c) Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit demam berdarah, malaria dan TBC	Pelaksanaan Surveilans Penyakit DBD, Malaria, TBC dan flu burung	Meningkatnya Respons Time dan screening penyakit potensial KLB Berbasis Rumah sakit dengan median 24 jam.
	d) Meningkatnya kewaspadaan terhadap berkembangnya penyakit HIV/Aids.	Pelaksanaan Surveilans Penyakit HIV/AIDS	Meningkatnya Respons Time penyakit potensial KLB Berbasis Rumah sakit dengan median 24 jam.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan RSUD	1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar	a) Bertambahnya jumlah Rumah bersalin puskesmas yg mampu PONEK. b) Bertambahnya jumlah Puskesmas Kecamatan yang mampu PONEK.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			c) Bertambahnya jumlah Puskesmas Kecamatan yg melaksanakan MTBS.
		2. Peningkatan pelayanan Kesehatan Spesialis	a) Meningkatnya RSUD dengan Cost Recovery > 70 persen = 40 persen. b) Meningkatnya jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan QA (ISO 9001-2000 atau Depkes) 50 persen. c) Meningkatnya Rumah Sakit dengan BOR > 60 persen menjadi 20 persen. d) Meningkatnya Rumah Sakit dengan LOS < 5 hari = 90 persen. e) Meningkatnya Kepuasan Pelanggan RSUD menjadi diatas 70 persen. f) Meningkatnya RSUD dengan NET Death Rate < 25/oo = 60 persen. g) Meningkatnya Rumah Sakit dengan jumlah bed kelas 3 sesuai standar Departemen Kesehatan 93 persen. h) Terselenggaranya sosialisasi dan peningkatan upaya pencegahan malpraktek di rumah sakit.
		3. Peningkatan Pelayanan Puskesmas	a) Meningkatnya Puskesmas dengan Cost recovery > 50 persen = 60 persen. b) Meningkatnya Prosentase Puskesmas melaksanakan QA (ISO 9001-2000) = 20 persen. c) Meningkatnya Kepuasan Pelanggan Puskesmas 70 persen. d) Meningkatnya jumlah Puskesmas dengan pelayanan RB 90 persen.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		4. Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional	<p>a) Terstandarisasinya 10 persen jenis/metode pengobatan tradisional.</p> <p>b) Terlatihnya 30 persen petugas kesehatan kotamadya dan puskesmas tentang teknis pengobatan tradisional.</p> <p>c) Tersedianya 75 persen dokumen peraturan kebijakan tentang pengobatan tradisional.</p> <p>d) Tersedianya 75 persen dokumen kebijakan dan struktur organisasi pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional.</p> <p>e) Pemetaan 80 persen sarana pengobatan tradisional.</p>
		5. Peningkatan pelayanan farmasi makanan dan minuman	<p>a) Meningkatnya jumlah Puskesmas memenuhi standar 80 persen obat generik (60 persen).</p> <p>b) Meningkatnya jumlah Industri rumah tangga yang berizin yang dimonitor sesuai standar (30 persen).</p> <p>c) Meningkatnya pengawasan makanan dan minuman yang tidak sehat.</p>
		6. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin	<p>a) Meningkatnya kualitas data keluarga miskin.</p> <p>b) Tersedianya indikator mutu pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kartu miskin/kartu sehat.</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			c) Tersusunnya Perda tentang Sistem Kesehatan Propinsi DKI Jakarta
3. Penanganan Gawat Darurat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di unit gawat darurat	1. Peningkatan pelayanan siaga kesehatan	Tersedianya pedoman pelayanan gadar dan bencana
		2. Peningkatan komunikasi pelayanan gawat darurat dan bencana.	a) Tersedianya Sistem pelayanan gadar dan bencana. b) Terlaksananya pengenaan sanksi bagi rumah sakit/puskesmas yang tidak melaksanakan pedoman pelayanan gadar dan bencana terutama bagi keluarga miskin.
		3. Peningkatan pelayanan satuan tugas	Terlaksananya pelatihan gadar bencana bagi petugas dan masyarakat.
		4. Peningkatan penyiapan gawat darurat dan bencana	a) Meningkatnya Respon Time ambulance <20 menit. b) Terlaksananya Pembuatan Public Safety Center di 5 Wilayah (15/Tahun). c) Tersusunnya informasi Gadar dan Bencana yang di butuhkan. d) Tersedianya akses informasi gawat darurat untuk masyarakat dan gakin.
4. Program perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan	a) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan	Peningkatan peran serta masyarakat	a) Meningkatnya jumlah Posyandu mandiri 10 persen. b) Meningkatnya jumlah Sekolah dengan UKS 75 persen. c) Meningkatnya jumlah Sekolah dengan Dokter Kecil 80 persen. d) Meningkatnya Sekolah dengan PSN DBD 100 persen.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			<ul style="list-style-type: none"> e) Meningkatnya keterlibatan LSM dalam kesehatan 50 persen. f) Meningkatnya partisipasi Saka Bhakti Husada 100 persen. g) Meningkatnya Kelurahan sayang ibu dan bayi 40 persen. h) Meningkatnya Kelompok Lansia per Puskesmas 80 persen. i) Tersedianya pojok laktasi di tempat kerja.
	<p>b) Terselenggaranya sistem perencanaan dan pembiayaan kesehatan yang baik</p>	<p>Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya Tahapan perencanaan 100 persen. b) Tersedianya Dokumen perencanaan sebanyak 5 dokumen. c) Tersedianya Dokumen pengendalian dan penilaian sebanyak 5 Dokumen. d) Tersedianya Dokumen Indikator pencapaian Program 1 Dokumen. e) Tersedianya Dokumen Juknis Pelaporan 1 Dokumen. f) Tersedianya Provincial Health Account. g) Tersedianya dokumen kebijakan Pembiayaan Kesehatan.

E. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan pembangunan kependudukan dan ketenagakerjaan adalah meningkatkan pengendalian penduduk dan sumber daya tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan produktivitas masyarakat.

2) Strategi

- a) Mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berbasis masyarakat dengan membangun kemitraan bersama usaha besar untuk menciptakan jaringan usaha yang kuat, tahan terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi serta mampu memacu peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- b) Mengoptimalkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah kependudukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan penduduk serta mengendalikan arus perpindahan penduduk (urbanisasi) ke Propinsi DKI Jakarta.

2) Program dan Kegiatan Prioritas:

- a) Pengendalian Kependudukan, dengan kegiatan : (1) Pembentukan pusat konseling remaja, (2) Penyiapan sumberdaya manusia kesehatan reproduksi remaja, (3) Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui Kesehatan Reproduksi, (4) Pembentukan paguyuban KB pria, (5) Peningkatan KB pria, (6) Peningkatan kepesertaan KB masyarakat, (7) Penguatan Kelembagaan KB, (8) Pengembangan Pelayanan KB Mandiri, (9) Peningkatan monitoring dan Pengawasan Mobilitas Penduduk
- b) Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kegiatan : (1) Pengembangan sistem komputerisasi kependudukan dan catatan sipil, (2) Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan

- catatan sipil, (3) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam rangka pelayanan kependudukan dan catatan sipil (PTT)
- c) Pengembangan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan, (2) Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
 - d) Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja, dengan kegiatan : (1) Perlindungan dan Pengawasan hukum Ketenagakerjaan, (2) Pengembangan manajemen laktasi bagi tenaga kerja perempuan di tempat kerja, (3) Pengawasan dan Perlindungan kesejahteraan tenagakerja,
 - e) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan : Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja

3) Matriks Indikator Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
KEPENDUDUKAN			
1. Pengendalian Kependudukan	a) Menurunnya jumlah perkawinan usia dini	Pembentukan pusat konseling remaja	a) Terlaksananya pembentukan pusat konseling remaja melalui jalur sekolah (SMP dan SMU/K) di 150 lokasi. b) Terlaksananya pelatihan dan orientasi petugas konseling KRR bagi guru BP dan Pengurus OSIS SMP dan SMU/K sebanyak 450 orang.
	b) Meningkatnya pemahaman dan upaya masyarakat, keluarga dan remaja terhadap kesehatan reproduksi	Penyiapan sumber daya manusia kesehatan reproduksi remaja	Terlaksananya kajian Data Perkawinan Usia Dini di 267 Kelurahan
	c) Meningkatnya jumlah peserta KB	Peningkatan Ketahanan Keluarga melalui kesehatan reproduksi	a) Meningkatnya proporsi wanita dan pria pernah kawin terhadap pemahaman Kesehatan Reproduksi sebesar 89,5 persen menjadi 93 persen. b) Meningkatnya cakupan pelayanan Tribina (BKB=206,BKR=91,BKL=118). c) Meningkatnya pemahaman keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I terhadap kesehatan reproduksi melalui 2.372 kelompok UPPKS.
	d) Meningkatnya jumlah pasangan usia subur yang ber KB mandiri	Pembentukan paguyuban KB pria	Terbentuknya paguyuban KB pria di 267 Kelurahan
	e) Menurunnya angka migrasi	1. Peningkatan KB pria	Meningkatnya akseptor KB pria dari 2,62 persen menjadi 4,00 persen dari total peserta KB (MOP = 7,617 akseptor dan kondom = 36.827 akseptor)

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Peningkatan kepesertaan KB masyarakat	Meningkatnya kepesertaan KB masyarakat dari 57 persen menjadi 60 persen
		3. Penguatan Kelembagaan KB	a) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB secara memadai. b) Terselenggaranya pembinaan 2.566 institusi KB. c) Terselenggaranya mapping pasangan usia subur yang tidak dan ber KB di 267 Kelurahan. d) Terbinanya kesertaan ber-KB melalui peningkatan ekonomi keluarga sebanyak 35.000 Keluarga Prasejahtera Plus (KPS).
		4. Pengembangan Pelayanan KB Mandiri	a) Terselenggaranya social marketing KB mandiri b) Terselenggaranya peningkatan peserta KB mandiri sebesar 35 persen dari total peserta KB
		5. Peningkatan monitoring dan pengawasan mobilitas penduduk	a) Meningkatnya sistem pengendalian urbanisasi b) Tersedianya data penyebaran dan karakteristik penduduk. c) Tersedianya data dan informasi jumlah penduduk yang mudik dan balik serta data urban d) Tersedianya data mobilitas penduduk dan informasi secara terpadu, baik penduduk pendatang dan tamu di Propinsi DKI Jakarta. e) Terlaksananya penyuluhan terhadap paguyuban dan pengerah tenaga kerja

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
2. Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	a) Tersedianya data dasar kependudukan yang akurat dan lengkap yang didukung oleh teknologi	Pengembangan sistem komputerisasi kependudukan dan catatan sipil	a) Meningkatnya kemampuan dan kualitas data base penduduk b) Tersedianya data dan informasi penduduk yang mutakhir c) Terintegrasinya sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
	b) Terciptanya administrasi kependudukan yang baik	1. Peningkatan kualitas administrasi kependudukan dan catatan sipil	Meningkatnya kerjasama dengan instansi terkait
		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam rangka pelayanan kependudukan dan catatan sipil (PTT)	a) Tersedianya sosialisasi administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui media massa b) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat c) Terpenuhinya kebutuhan jumlah SDM dalam rangka mendukung operasional KTP online di tingkat Kelurahan d) Meningkatnya kualitas SDM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
KETENAGAKERJAAN			
1. Pengembangan Kesempatan Kerja	a) Meningkatnya informasi ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja untuk masyarakat	Peningkatan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan	a) Terlaksananya Pengembangan sistem informasi dan bursa kerja (SIMNAKER) on line dan mutakhir. b) Terlaksananya bursa kerja expo 2 kali setahun. c) Tersedianya data lowongan kerja dan pencari kerja

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Terciptanya peluang kerja dan usaha bagi pekerja dan tenaga kerja penyandang cacat	Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja	a) Terciptanya peluang kerja dan usaha bagi pencari kerja termasuk pencari kerja penyandang cacat b) Meningkatnya penempatan tenaga kerja dalam negeri sebesar 10 persen dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebesar 2 persen c) Meningkatnya penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja sebesar 50 persen d) terlaksananya kerjasama antar daerah dalam rangka penempatan transmigrasi (MoU) di 3 (tiga) lokasi dan daerah-daerah lainnya. e) Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, pemindahan transmigrasi f) Mengoptimalkan tenaga kerja dari wilayah DKI dengan mengutamakan masyarakat sekitar perusahaan dengan tetap memperhatikan kualitas dan kompetensi.
2. Perlindungan dan Pengendalian Tenaga Kerja	a) Meningkatnya perlindungan, pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan khususnya bagi perempuan	Perlindungan dan pengawasan hukum ketenagakerjaan	a) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan b) Terlaksananya Pengkajian Permasalahan Pramuwisma c) Terlaksananya pembinaan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara optimal.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			<p>d) Terlaksananya pengkajian pengawasan dan perlindungan penggunaan bahan bakar gas (BBG)</p> <p>e) Terdata, terlayani dan terawasinya pengguna tenaga kerja warga negara asing</p> <p>f) Terlaksananya pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja (K3 di perusahaan) secara optimal</p> <p>g) Tersedianya diklat tata hubungan dan budi pekerti di BLK</p> <p>h) Menurunnya tingkat kecelakaan kerja di DKI Jakarta.</p> <p>i) Terlaksananya perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan serta tidak ada diskriminasi</p> <p>j) Terlaksananya sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.</p>
	<p>b) Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi oleh program jamsostek</p>	<p>1. Pengembangan manajemen laktasi bagi tenaga kerja perempuan di tempat kerja</p>	<p>Terlaksananya penerapan manajemen laktasi di tempat kerja</p>
		<p>2. Pengawasan dan Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja</p>	<p>a) Terlaksananya peningkatan peserta Jamsostek sebesar 3 persen</p> <p>b) Tersedianya data peserta Jamsostek pada perusahaan-perusahaan</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			c) Terlaksananya peningkatan peserta AKDHK dari 22.322 orang menjadi 29.018 orang
3. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya upah dan produktivitas tenaga kerja	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	a) Terlaksananya evaluasi dampak penetapan UMP b) Terlaksananya penerapan UMP c) Terselenggaranya kegiatan di 7 BLK secara memadai dan sarana-prasarana d) Terlaksananya pembinaan peningkatan produktivitas tenaga kerja sebanyak 1000 orang

F. BIDANG SOSIAL BUDAYA

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan pembangunan sosial dan budaya adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam rangka mengurangi konflik sosial dan tawuran masa, meningkatkan infrastruktur sosial dalam rangka pengendalian PMKS, penyalahgunaan narkoba dan tawuran pelajar, serta meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembinaan agama, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga.

2) Strategi

- a) Mengatasi permasalahan sosial seperti penggunaan narkoba, tawuran pelajar dan masalah sosial lainnya yang berpotensi mengurangi produktivitas masyarakat dan mengganggu jalannya proses belajar mengajar.
- b) Membangun komunikasi antar masyarakat DKI Jakarta yang bersifat heterogen dengan memperhatikan akar budaya masing-masing daerah sehingga seminimal mungkin dapat menekan terjadinya konflik-konflik horisontal.
- c) Memantapkan arah dan tujuan pembangunan sosial dengan mengoptimalkan peranan pemerintah, swasta dan dukungan masyarakat untuk menghindari terjadinya penurunan moral pemerintah dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
- d) Meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembinaan kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga.

3) Program dan Kegiatan Prioritas:

- a) Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama, dengan kegiatan :
Pembinaan kehidupan beragama
- b) Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan, dengan kegiatan :
(1) Pembinaan lembaga sosial keagamaan, (2) Peningkatan sarana prasarana sosial keagamaan.
- c) Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan : (1) Peningkatan pemberdayaan potensi Lansia, (2) Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- d) Peningkatan Peranserta Sosial Masyarakat, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Pembinaan peran serta sosial masyarakat, (2) Pelatihan pekerja sosial dan TKSM terdidik
- e) Peningkatan Pelayanan Pemakaman, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman, (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemakaman
- f) Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Ketahanan Masyarakat, (2) Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- g) Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dengan kegiatan : (1) Pemberdayaan Dekel dan Lembaga Kemasyarakatan, (2) Pembinaan bagi kelompok usaha rumah tangga, (3) Peningkatan pembinaan masyarakat Kelurahan, (4) Pemanfaatan TTG masyarakat, (5) Peningkatan Pelaksanaan PPMK.
- h) Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender, (2) Pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- i) Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, dengan kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan pemanfaatan Seni Budaya dan permuseuman

- j) Pengembangan Museum dan Pelestarian Peninggalan Cagar Budaya/Sejarah, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Museum dan Sarana Seni Budaya, (2) Peningkatan sarana Prasarana Seni Budaya dan Museum.
- k) Pengawasan Pemugaran, dengan kegiatan : Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya
- l) Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka, dengan kegiatan : (1) Pemberdayakan organisasi pemuda dan pelajar, (2) Peningkatkan aktivitas pramuka
- m) Peningkatan Prestasi Olahraga, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Prestasi Olahraga, (2) Peningkatan pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa.
- n) Pembinaan Olahraga Masyarakat, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Olahraga, (2) Peningkatan kualitas pelajar, kepemudaan dan pramuka, (3) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok olahraga di tingkat RT/RW.

4) Matriks Indikator Bidang Sosial Budaya

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
KEAGAMAAN			
1. Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama	Meningkatnya kualitas penyuluh, pembimbing, tokoh dan pemuka agama dalam pembinaan kehidupan beragama	Pembinaan Kehidupan Beragama	<ul style="list-style-type: none"> a) Terlaksananya pembinaan potensi SDM Sosial Keagamaan b) Terlaksananya Pembinaan mental spiritual dan keagamaan terhadap masyarakat rentan sosial. c) Meningkatnya kualitas SDM penyuluh dan pembimbing agama. d) Terlaksananya peningkatan kerukunan hidup beragama e) Terlaksananya intensif pembinaan keagamaan di tingkat RT/RW sehingga terwujud kerukunan antar umat beragama.
2. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan	a) Meningkatnya peranan lembaga-lembaga sosial keagamaan.	Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatnya kemampuan lembaga sosial keagamaan. b) Meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan. c) Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan SK Gubernur No. 1571/2002, 137/2002 dan 145/2002 termasuk penyediaan mushola dan masjid di sarana perbelanjaan dan perpasaran.
	b) Meningkatnya sarana dan prasarana kegiatan keagamaan.	Peningkatan Sarana Prasarana sosial Keagamaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana sosial keagamaan

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	a) Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial terhadap penduduk usia lanjut, penyandang cacat dan anak terlantar.	Peningkatan pemberdayaan potensi Lansia	a) Meningkatnya pelayanan dan terkoordinasinya wadah perkumpulan lansia. b) Tersedianya bantuan yang berkesinambungan untuk Panti Sosial Tresna Werda dan Panti Sosial Asuhan Anak serta Asuhan Keluarga.
	b) Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak balita terlantar dan anak jalanan, korban narkoba.	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	a) Tersusunnya dan terlaksananya kebijakan penanganan PMKS dan pemberdayaan sosial masyarakat. b) Meningkatnya penanganan PMKS dalam panti dan non panti sosial c) Meningkatnya koordinasi dan kerjasama penanganan PMKS lintas sektor dan antar daerah d) Tersusunnya kajian tentang permasalahan kesejahteraan sosial e) Meningkatnya sarana dan prasarana panti-panti sosial f) Meningkatnya peran masyarakat dalam penanganan PMKS g) Meningkatnya bantuan dan perlindungan sosial korban bencana dan musibah sosial lainnya h) Meningkatnya kerjasama pelayanan sosial di panti dengan perguruan tinggi i) Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, dan masyarakat, serta rehabilitasi melalui Panti Sosial.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
<p>2. Peningkatan Peranserta Sosial Masyarakat</p>	<p>a) Meningkatnya jumlah dan kualitas TKSM, Orsos/LSM dan dunia usaha yang berperan aktif dalam memberikan pelayanan sosial termasuk dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba</p>	<p>Peningkatan pembinaan peran serta sosial masyarakat</p>	<p>a) Meningkatnya peran sosial masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) b) Terselenggaranya promosi sosial. c) Meningkatnya kemampuan Pekerja Sosial Masyarakat / relawan sosial, pengurus lembaga-lembaga kesos dan tenaga kesos lainnya d) Terlaksananya fasilitasi jejaring kerja pemerintah, masyarakat dan stake holder lainnya berdasar issue sosial e) Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga-lembaga kesos</p>
	<p>b) Meningkatnya jumlah pekerja sosial dan TKSM terdidik dan terlatih yang didayagunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.</p>	<p>Pelatihan pekerja sosial dan TKSM terdidik</p>	<p>Terlaksananya Pelatihan bagi Pekerja Sosial dan TKSM terdidik</p>
<p>3. Peningkatan Pelayanan Pemakaman</p>	<p>a) Meningkatnya kemudahan pemberian fasilitas pemakaman bagi masyarakat umum</p>	<p>Peningkatan Sarana Prasarana Pemakaman</p>	<p>a) Meningkatnya sarana prasarana pemakaman dari 35,46 persen pada tahun 2004 menjadi 36,38 persen pada tahun 2005. b) Meningkatnya pelayanan pemakaman bagi masyarakat umum termasuk masyarakat tidak mampu dari 34.894 jenazah pada tahun 2004 menjadi 37.127 jenazah pada tahun 2005. c) Terlaksananya hubungan kemitraan dengan 7 yayasan pemakaman yang beranggotakan sekitar ± 2.500 pencari nafkah</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			d) Meningkatnya penyediaan petak makam baru, dari 2.266 petak pd tahun 2004 menjadi 9.117 petak pd th 2005 e) Tersedianya kajian rambu-rambu komersialisasi pengembangan pemakaman oleh pihak swasta f) Meningkatnya koordinasi penataan sarana dan prasarana pemakaman secara lintas sektoral
	b) Semakin tertibnya penataan lahan pemakaman	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemakaman	a) Terlaksananya penataan TPU dari 9 lokasi TPU pada tahun 2004 menjadi 14 TPU pada tahun 2005 b) Tersedianya penambahan mobil jenazah dari 8 unit pada tahun 2004 menjadi 15 unit pada tahun 2005 c) Terlaksananya pemetaan blok petak makam untuk 94 lokasi TPU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1. Peningkatan Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.	a) Meningkatnya pelayanan dan bantuan pada korban bencana.	Peningkatan Ketahanan Masyarakat	a) Terlaksananya penyuluhan terpadu bina ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana di 6 Wilayah b) Tersedianya data, analisa, pemberdayaan masyarakat Kelurahan di 267 Kelurahan c) Terlaksananya Penyempunaan pola sistem pemberdayaan masyarakat Kelurahan d) Meningkatnya pelayanan bagi 80.961 Rumah Tangga Miskin

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	<p>b) Meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi dan sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat</p>	<p>e) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi kemiskinan.</p> <p>f) Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa/Kel di 90 Lokasi pada 5 Kotamadya</p> <p>a) Terlaksananya pengembangan Koran Komunitas di 25 Kelurahan</p> <p>b) Terlaksananya Pelatihan Manajemen bagi pendamping Pemberdayaan Masyarakat 267 orang</p> <p>c) Terlaksananya sosialisasi model Lembaga Keuangan Mikro bagi pengelola UPKMK 267 Kelurahan</p> <p>d) Terbentuknya lembaga keuangan mikro di 267 Kelurahan</p>
<p>2. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.</p>	<p>a) Semakin berperannya Dewan Kelurahan dalam menjalankan fungsinya</p>	<p>Pemberdayaan Dekel dan Lembaga Kemasyarakatan</p>	<p>a) Tersedianya Social Mapping Masyarakat di 267 Kelurahan</p> <p>b) Terlaksananya Evaluasi dan mekanisme kerja Dekel (Reengineering Dekel) di 267 Kelurahan</p> <p>c) Tersedianya SDM, Fasilitator dan Kader Pemberdayaan Masyarakat di 267 Kelurahan</p> <p>d) Terlaksananya penyelesaian gedung PPMJ 1 unit</p> <p>e) Terlaksananya uji kompetensi dan sertifikasi bagi 267 pendamping oleh PPMJ</p>

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Bertambahnya usaha-usaha rumah tangga yang memperoleh dana bergulir	Pembinaan bagi kelompok usaha rumah tangga	1) Terlaksananya jaringan informasi terpadu kelompok usaha rumah tangga di 267 Kelurahan 2) Tersedianya sarana dan prasarana promosi hasil usaha unggulan masyarakat di tingkat Kotamadya/Kab
	c) Meningkatnya peran warga masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan wilayah Kelurahan	1. Peningkatan pembinaan masyarakat Kelurahan	Tersedianya Replikasi model perencanaan berbasis komunitas bagi 50 Kelurahan
		2. Pemanfaatan TTG masyarakat.	a) Terselenggaranya penanggulangan limbah domestik di 20 Kelurahan b) Terlaksananya teknologi kebersihan di 30 Kelurahan. c) Terselenggaranya gelar teknologi tepat guna. d) Terlaksananya Peningkatan sumber daya daerah dan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 20 Kelurahan
3. Peningkatan Pelaksanaan PPMK.	a) Terlaksananya Maping kondisi implementasi PPMK di 267 Kelurahan. b) Terlaksananya Capacity building bagi para pengelola PPMK di 267 Kelurahan.		
3. Pemberdayaan Perempuan.	a) Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Gender	Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender	a) Terlaksananya Implementasi kesetaraan dan keadilan gender b) Terlaksananya sosialisasi UU KDRT c) Terselenggaranya workshop hukum dan HAM bagi organisasi perempuan. d) Terlaksananya action plan Gender Mainstreaming

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			e) Terlaksananya kajian kepemimpinan manajerial perempuan f) Meningkatnya peran perempuan dalam bidang sosial keagamaan, ekonomi, politik dan pemerintahan g) Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM dan Lembaga Perempuan
	b) Menurunnya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.	a) Terlaksananya jejaring kerja lembaga P2TP2A. b) Terselenggaranya advokasi pencegahan Trafficking Perempuan dan anak bagi aparat dan lembaga masyarakat yang terkait. c) Terlaksananya kajian terhadap kasus perceraian yang ditimbulkan akibat kekerasan terhadap perempuan.
PELESTARIAN BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			
1. Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Terwujudnya sistem nilai budaya Betawi yang diperkaya oleh budaya nasional yang serasi dan kondusif	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya dan permuseuman.	a) Penyusunan masterplan seni budaya dan permuseuman di DKI Jakarta b) Terselenggaranya perlindungan dan pengembangan seni budaya Betawi serta bertambahnya lokasi yang menyediakan kesenian Betawi di DKI Jakarta c) Terlaksananya Perda Pusat Budaya Betawi. d) Terselenggaranya promosi Budaya Betawi di tingkat lokal, nasional, dan internasional

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			e) Tersusunnya pedoman kerjasama antara Pemda dan mitra swasta/masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Seni Budaya dan permuseuman f) Meningkatnya perlindungan terhadap bangunan-bangunan bersejarah seperti Masjid Tua, Museum dan lain-lain.
2. Pengembangan museum dan pelestarian peninggalan cagar budaya/sejarah	a) Meningkatnya sistem informasi seni budaya, peninggalan sejarah dan permuseuman	Peningkatan Kualitas Pelayanan Museum dan Sarana Seni Budaya	a) Terbangunnya sistem informasi seni budaya dan permuseuman, jumlah kelompok pencinta budaya dan seni, serta kelompok arsitektur budaya b) Tersusunnya standar penyelenggaraan kegiatan seni budaya dan permuseuman c) Tersusunnya sistem data dan informasi tinggalan sejarah, museum dan monumen
	b) Meningkatnya pemeliharaan museum, cagar budaya dan peninggalan bersejarah	Peningkatan sarana Prasarana Seni Budaya dan Museum	a) Terlaksananya Asset management plan terhadap aset seni budaya dan permuseuman (216 bangunan cagar budaya, dan 7 museum) b) Meningkatnya koordinasi penataan kawasan cagar budaya secara lintas sektoral
3. Pengawasan Pemugaran	Meningkatnya apresiasi pelajar dan masyarakat akan peninggalan bersejarah	Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap Seni Budaya	a) Terlaksananya advokasi dan social marketing seni budaya dan permuseuman ke sekolah, masyarakat dan masyarakat pecinta budaya b) Terselenggaranya kemitraan antara 7 museum, 2 sanggar kesenian dengan mitra swasta/masyarakat

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN			
1. Peningkatan Peran Kepemudaan dan Pramuka	a) Meningkatnya peran dan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba	Pemberdayaan Organisasi Pemuda dan Pelajar	Terlaksananya pembinaan 30 Organisasi pemuda dan 20 Organisasi pelajar
	b) Meningkatnya jumlah keanggotaan pramuka pada siswa tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah	Peningkatan Aktivitas Pramuka	a) Terselenggaranya publik campaign program Pramuka sebanyak 13 kali di sekolah-sekolah. b) Meningkatnya jumlah anggota Pramuka Siaga sebanyak 500 orang, Penggalang sebanyak 700 orang dan Penegak sebanyak 500 orang. c) Meningkatnya aktivitas pramuka di lingkungan sekolah dan masyarakat d) Terselenggaranya pengembangan jenis kegiatan pramuka sesuai dinamika sosial
2. Peningkatan Prestasi Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga daerah	1. Peningkatan Prestasi Olahraga	a) Terselenggaranya pemassalan dan pembibitan 14 cabang olahraga unggulan b) Terlaksananya pemberian jaminan masa depan bagi atlet berprestasi.
		2. Peningkatan pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa	a) Terselenggaranya invitasi 14 cabang olahraga pelajar dan mahasiswa b) Terselenggaranya POPNAS, POMNAS, PORSENI. c) Terselenggaranya kejuaraan basket ball sister city dan Jakarta internasional 10

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
<p>1. Pembinaan Olahraga Masyarakat</p>	<p>Meningkatnya minat masyarakat berolahraga</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Olahraga</p>	<p>a) Terselenggaranya masterplan pengembangan sarana olahraga b) Terselenggaranya penyelesaian rehab 1 gelanggang remaja c) Terselenggaranya pengembangan fungsi 29 gelanggang remaja Kecamatan d) Terbangunnya 29 lapangan volley, 27 lapangan basket, dan 4 lapangan tenis e) Tersedianya ruang terbuka umum untuk olahraga pada kawasan padat penduduk. f) Pengawasan dan pemeliharaan asset olah raga secara optimal.</p>
		<p>2. Peningkatan kualitas pelajar, kepemudaan dan pramuka</p>	<p>a) Tersedianya sarana prasarana olahraga, pemuda dan pramuka b) Terselenggaranya orientasi dan pembangunan karakter kepemimpinan generasi muda</p>
		<p>3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok olahraga di tingkat RT/RW</p>	<p>Meningkatnya jumlah kelompok olahraga ditingkat Rt/RW yang terbina</p>

G. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan yang ditetapkan untuk bidang ini adalah meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui perluasan ruang terbuka hijau, dan pengendalian produksi, konsumsi dan aktivitas yang kurang ramah lingkungan.

2) Strategi

Meminimalkan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap daya dukung lingkungan dan sumber daya alam.

3) Program dan Kegiatan Prioritas:

- a) Pengembangan Sumber Daya Pertambangan dan Energi, dengan kegiatan : (1) Pengembangan data informasi dan pelayanan kebutuhan energi dan sumber daya mineral, (2) Penyusunan program dan penyelenggaraan energi migas dan energi ketenaga listrikan
- b) Pengembangan Sumber Air Tanah, dengan kegiatan : (1) Pembangunan sarana konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, (2) Pemantauan kualitas, kuantitas dan pemakaian air bawah tanah, (3) Pembangunan sumur bor dan pengolahan air di kawasan rawan air bersih.
- c) Peningkatan Kualitas Lingkungan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan Program PBILL, (2) Peningkatan Program Kali Bersih, (3) Peningkatan Program kemitraan dan informasi kualitas LH, (4) Peningkatan Program Udara Bersih dari Sumber Bergerak, (5) Pengendalian pencemaran udara dari Sumber Tidak Bergerak
- d) Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan, dengan kegiatan : (1) Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, (2) Pelaksanaan Tata Praja Lingkungan, (3) Peningkatan Penataan Penegakan Hukum Lingkungan.

- e) Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan : (1) Penyusunan rencana pengembangan RTH makro dan pada kawasan strategis, (2) Penyusunan petunjuk teknis dengan petunjuk pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau/kota pertamanan, (3) Pengembangan dan penataan RTH Pertamanan kota, (4) Penyediaan ruang interaksi publik di permukiman padat, (5) Penyediaan pohon dan tanaman hias yang sesuai dengan kondisi Jakarta pada kebun bibit, (6) Pengembangan peran serta masyarakat dalam penghijauan, (7) Pengendalian penebangan pohon (8) Refungsi RTH pertamanan.

- f) Penyerasian dan Keindahan Lingkungan, dengan kegiatan : (1) Penataan dan pengembangan taman kota, (2) peningkatan kualitas taman, (3) Pembangunan ornamen kota, (4) Penataan street furniture, (5) Penyediaan dekorasi kota, (6) Peran serta masyarakat dalam penyerasian pengindahan lingkungan

- g) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah, (2) Peningkatan pengelolaan air kotor, (3) Penyediaan lahan untuk lokasi TPST minimal di 1 wilayah Kotamadya, (4) Terwujudnya pembangunan TPST Duri Kosambi.

- h) Peningkatan Pelayanan Kebersihan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan kualitas jasa operasional persampahan, (2) Penyelesaian program studi pengelolaan persampahan WJEMP, (3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah

4) Matriks Indikator Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
SUMBER DAYA ALAM			
1. Pengembangan sumber daya pertambangan dan energi	Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang dan energi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat	1. Pengembangan data informasi dan pelayanan kebutuhan energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya data informasi dan terpenuhinya kebutuhan ESDM
		2. Penyusunan program dan penyelenggaraan energi migas dan ketenaga listrikan	a) Tersedianya program penyediaan energi ketenaga listrikan di Kep. Seribu b) Tersedianya program dan pembinaan pemanfaatan energi, migas dan ketenagalistrikan
2. Pengembangan sumber air tanah	Terkendalinya penggunaan air tanah oleh instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1. Pembangunan sarana konservasi dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah	Terbangunnya 160 sumur resapan dan 3 sumur pantau, terselenggaranya pembinaan pemanfaatan air bawah tanah
		2. Pemantauan kualitas, kuantitas dan pemakaian air bawah tanah	Tersedianya data kualitas, kuantitas dan pemakaian air bawah tanah
		3. Pembangunan sumur bor dan pengolahan air di kawasan rawan air bersih	Terbangun dan tersedianya air bersih di 5 lokasi
LINGKUNGAN HIDUP			
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan	a) Meningkatkan fungsi laut sebagai sumber daya ekonomi, transportasi dan pariwisata	Peningkatan Program PBLL	a) Tersedianya informasi peringatan dini (early warning system) dalam pengendalian kualitas perairan teluk Jakarta b) Menurunnya beban limbah 30 persen dari sumber-sumber kegiatan di pantai c) Pembentukan institusi Pantai Bersih Laut Lestari

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Meningkatnya fungsi sungai/kali sebagai sumber daya ekonomi dan wisata	Peningkatan Program Kali Bersih	a) Menurunnya beban pencemaran ke sungai 50persen yang berasal dari limbah sumber institusi dan sampah padat. b) Meningkatnya keterpaduan pengelolaan DAS c) Meningkatnya pemanfaatan DAS sebagai ekowisata
	c) Meningkatnya peranserta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan fungsi sungai dan laut	Peningkatan Program kemitraan dan informasi kualitas LH	a) Meningkatnya peran masyarakat dan stakeholders lingkungan hidup b) Meningkatnya jaringan dan sosialisasi pengelolaan LH
	d) Terkendalinya emisi gas pencemar udara	1. Peningkatan Program Udara Bersih dari Sumber Bergerak	a) Berkurangnya beban emisi dari kendaraan bermotor sebesar 10 persen b) Meningkatnya mobil penumpang pribadi memenuhi baku mutu emisi 2 kali dari tahun 2004
2. Pengendalian pencemaran udara dari Sumber Tidak Bergerak		Berkurangnya emisi gas buang dari sumber tidak bergerak 3 kalinya dari tahun 2004	
2. Peningkatan Pengendalian Dampak Lingkungan	a) Terkendalinya pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup	Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup	a) Meningkatnya kualitas penilaian terhadap 200 dokumen AMDAL b) Meningkatnya kualitas pengawasan dari pelaksanaan RKL/RPL
	b) Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta akan pentingnya lingkungan hidup	Pelaksanaan Tata Praja Lingkungan	Tercapainya nilai bangun praja minimal 71 untuk setiap Kotamadya

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	c) Terlaksananya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang lingkungan hidup	Peningkatan Penataan Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatnya penuntasan kasus atau sengketa lingkungan
3. Penataan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau dan ruang interaksi publik	1. Penyusunan rencana pengembangan RTH makro dan pada kawasan strategis.	Tersedianya rencana konseptual dan panduan pengembangan pertamanan skala kuantitatif.
		2. Penyusunan Petunjuk Teknis dengan Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Terbuka Hijau/ Kota Pertamanan.	Tersedianya pedoman dan standar operasional baku dalam penataan RTH Pertamanan kota
		3. Pengembangan dan penataan RTH jalur hijau kota	Terbangunnya RTH jalur hijau kota dengan luas 37.618 M2 dan tertatanya RTH jalur hijau kota seluas 367.126 M2
		4. Penyediaan ruang interaksi publik di permukiman padat.	Terbangunnya taman-taman interaksi pada permukiman padat.
		5. Penyediaan pohon dan tanaman hias yang sesuai dengan kondisi Jakarta pada kebon bibit.	Tersedianya bibit pohon dan tanaman hias dari 9 kebon bibit sebanyak 78.000 tanaman
		6. Pengembangan peran serta masyarakat dalam penghijauan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam membangun/memelihara RTH pertamanan kota serta meningkatnya ratio hijau di lahan masyarakat
		7. Pengendalian penebangan pohon	Tersedianya peraturan pengendalian penebangan pohon dan terjadinya penurunan kasus penebangan pohon.
		8. Refungsi RTH Pertamanan	Terlaksananya refungsi taman kota seluas 21.802 M2

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
4. Penyerasian dan Keindahan Lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas taman kota	1. Penataan dan pengembangan taman kota	Terbangunnya taman-taman kota
		2. Peningkatan kualitas taman	Meningkatnya kualitas taman sebagai salah satu infrastruktur kota.
		3. Pembangunan ornamen kota	Terbangunnya ornamen kota dan kelengkapan taman di 17 lokasi.
		4. Penataan Street Furniture	Terbangunnya pedestrian yang nyaman.
		5. Penyediaan dekorasi kota	Terlaksananya event ibukota yang terlayani dengan tata hias kota sebanyak 5 event.
		6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyerasian pengindahan lingkungan.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan elemen estetika kota.
KEBERSIHAN			
1. Peningkatan sarana dan Prasarana Kebersihan	a) Meningkatnya pelayanan kebersihan	1. Peningkatan kapasitas pelayanan pengangkutan sampah	a) Tercapainya kapasitas optimal pengangkutan sampah ke TPST 1500 ton/hari dengan masa operasi selama 7 hari dalam seminggu di SPA Sunter. b) Tercapainya pengangkutan dan pengelolaan sampah dari TPS ke SPA dan TPA Bantar Gebang
		2. Peningkatan pengelolaan air kotor	a) Tercapainya pengangkutan air kotor dari sumber ke IPAK b) Terkendalinya sarana IPAK
	b) Tersedianya lokasi TPA dan pengolahan sampah dengan teknologi penanganan yang tepat guna	1. Penyediaan lahan untuk lokasi TPST minimal di 1 (satu) wilayah Kotamadya	Tercapainya penyediaan lahan untuk lokasi TPST minimal di 1 (satu) wilayah Kotamadya

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Pembangunan TPST Duri Kosambi	<i>Tercapainya pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna.</i>
2. Peningkatan Pelayanan Kebersihan	Meningkatnya kebersihan kota	1. Penyelesaian program studi pengelolaan persampahan WJEMP	Tersusunnya pengembangan program aksi strategis bagi pengelolaan sampah padat DKI Jakarta/Revisi Master plan
		2. Peningkatan kualitas jasa operasional persampahan.	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan dan pemusnahan akhir sampah dengan mitra swasta
		3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	a) Bertambahnya fungsi TPS yang menjadi sarana pemilahan sampah <i>b) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kebersihan kota.</i>

H. BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA

1) Arah dan Kebijakan

Arah dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kota adalah meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana kota dalam memberi pelayanan dan daya dukung kota.

2) Strategi

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik sehingga mampu mengatasi persoalan-persoalan kota besar seperti kemacetan, banjir, permukiman kumuh, ledakan pedagang kaki lima dan lain-lain

3) Program dan Kegiatan Prioritas:

- a) Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas, dengan kegiatan: pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu
- b) Penerangan Jalan dan Tempat Umum, dengan kegiatan : (1) Pembangunan penerangan jalan dan tempat umum, (2) Peningkatan kualitas penerangan jalan dan tempat umum, (3) peningkatan pelayanan penerangan jalan umum di tingkat Kelurahan.
- c) Pengembangan Pelayanan Air Limbah, dengan kegiatan: Pembangunan sarana air limbah dan pemulihan pencemaran air.
- d) Pengembangan Pelayanan Air Bersih, dengan kegiatan : (1) Pembangunan sarana air bersih didaerah rawan air bersih, (2) Pengkajian masalah pemenuhan air baku untuk air bersih.
- e) Pengendalian Banjir, dengan kegiatan : (1) Pembangunan sarana pengendali banjir, (2) Pemeliharaan sarana pengendali banjir.
- f) Peningkatan Drainase Kota, dengan kegiatan : (1) Penyelesaian program WJEMP (West Java Eastern Management Project), (2) Pembebasan

tanah, pembangunan dan pemeliharaan drainase kota, (3) Pemeliharaan saluran-saluran penghubung dan mikro/pemukiman.

- g) Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan, dengan kegiatan : (1) Pemeliharaan jalan dan jembatan, arteri, kolektor dan lokal, (2) Penyediaan lahan untuk jalan dan jembatan pada koridor Busway II dan III, (3) Peningkatan jalan dan jembatan pada koridor Busway II dan III, (4) Pembangunan dan Peningkatan simpang tak sebidang, (5) Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan arteri, kolektor dan lokal, (6) Pengadaan lahan untuk jalan dan jembatan arteri, kolektor dan lokal, (7) Peningkatan fasilitas trotoar pada ruas jalan tertentu.
- h) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan : (1) Penataan lalu lintas secara Kawasan, (2) Pengendalian dan Pengawasan operasi angkutan jalan, (3) Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas jalan, (4) Pengembangan dan pembinaan usaha angkutan umum, (5) Pengembangan dan pengendalian terminal Bus dan Mobil barang, (6) Pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pos dan telekomunikasi.
- i) Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum, dengan kegiatan : (1) Pembangunan prasarana penunjang koridor Busway II dan III, (2) Penertiban, pengawasan dan pengendalian operasional Busway, (3) Pengembangan Sistem BRT/Angkutan Massal, (4) Pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan laut, (5) Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana UPT Penyeberangan
- j) Pengembangan Perumahan, dengan kegiatan : (1) Pembangunan rumah susun dan manajemen pemeliharaan, (2) Penyusunan peraturan penggalangan kemitraan, (3) Manajemen Penyediaan Lahan Permukiman, (4) Penyusunan Kebijakan lahan perkotaan (Urban Land Policy)
- k) Pengembangan Lingkungan Permukiman, dengan kegiatan : (1) Perencanaan kawasan permukiman sehat, (2) Penataan Kawasan Hunian,

- (3) Pengendalian pembangunan permukiman, (4) Perbaikan lingkungan permukiman kumuh.
- l) Pelayanan Perumahan dan Permukiman, dengan kegiatan : (1) Penyediaan air bersih dan jaringan limbah komunal, (2) Manajemen UPT di segmen komersial, (3) Penataan tertib hunian, (4) Pemberian Bantuan hunian sementara (barak penampungan), (5) Penyusunan Kebijakan penghapusan suplai utilitas
- m) Perencanaan Ruang, dengan kegiatan : (1) Penguatan Organisasi Ketatakotaan, (2) Pengolahan data dasar, (3) Pengkajian Struktur Ruang Kota, (4) Peningkatan Kualitas Data Perencanaan, (5) Penyusunan penetapan peraturan perangkat insentif dan disentif dalam implementasi rencana tata ruang, (6) Penyusunan penetapan peraturan zoning regulasi dalam penataan ruang, (7) Peningkatan Green-ratio, Water-ratio dan Road-ratio.
- n) Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan : (1) Monitoring/Evaluasi Program Kerja dan Pelayanan Ketatakotaan, (2) Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota
- o) Penataan dan Pengawasan Bangunan, dengan kegiatan : (1) Peningkatan pelayanan perizinan bangunan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2000, (2) Pembuatan sistem informasi pelayanan, pengawasan dan penertiban bangunan, (3) Penyempurnaan Peraturan Daerah No.7 tahun 1991 tentang bangunan dalam wilayah DKI Jakarta, (4) Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap fisik bangunan dan pelaku pembangunan.
- p) Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis, dengan kegiatan Perencanaan pengembangan ruang kota
- q) Penataan Bangunan dan Gedung Pemda, dengan kegiatan antara lain : (1) Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya, (2) Pembangunan Gedung Kantor Samsat / Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya, (3) Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kantor Samsat / Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya, (4) Peningkatan kualitas dan keandalan bangunan gedung Pemda.

4) Matriks Indikator Bidang Sarana dan Prasarana Kota.

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
KELENGKAPAN KOTA			
1. Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas	Tertatanya jaringan listrik, gas, air bersih serta air limbah	Pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu	<i>Terbangunnya Ducting/Koker di Jl. HR. Rasuna Said sepanjang 4.500 m</i>
2. Penerangan Jalan dan Tempat Umum	Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum	1. Pembangunan penerangan jalan dan tempat umum	Bertambahnya jumlah titik lampu penerangan jalan lingkungan, MHT, kumuh dan pinggiran kota serta tempat umum lainnya sebanyak ± 2.500 tiang dengan ± 8.000 lampu
		2. Peningkatan kualitas penerangan jalan dan tempat umum	Meningkatnya kualitas titik lampu di jalan dan tempat umum pada daerah-daerah rawan kriminalitas dan tempat umum lainnya sebanyak ± 1.200 tiang dengan ± 2.800 lampu
		3. Peningkatan pelayanan penerangan jalan umum di tingkat Kelurahan	Tercapainya respon time yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat
3. Pengembangan Pelayanan Air Limbah	Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan jaringan air limbah buangan pabrik, pertokoan, restoran, dll	Pembangunan sarana air limbah dan pemulihan pencemaran air	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah di sarana umum dan pemukiman kumuh
4. Pengembangan Pelayanan Air Bersih	a) Meningkatnya mutu pelayanan air bersih	Pembangunan sarana air bersih di daerah rawan air bersih	Terbangunnya instalasi pengolahan air bersih di 5 (lima) lokasi
	b) Meningkatnya pemenuhan air baku untuk air bersih	Pengkajian masalah pemenuhan air baku untuk air bersih	Terlaksananya kajian permasalahan pemenuhan air baku untuk air bersih

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
TATA AIR			
1. Pengendalian Banjir	a) Berkurangnya titik rawan genangan banjir	Pembangunan sarana pengendali banjir	a) Terbangunnya sistem pengendali banjir berupa rumah pompa, pompa & pintu air. b) Terlaksananya pengawasan trace untuk situ & sungai. c) Terlaksananya peta banjir hasil kaji ulang. d) Tersedianya Early Warning System untuk Pengendalian Banjir. e) Terlaksananya pembebasan tanah BKT.
	b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pengendalian banjir: saluran/kali, waduk/situ, pompa air dan pintu air	Pemeliharaan sarana pengendali banjir	a) Terlaksananya layanan pembersihan saluran di 3 sistem aliran (Barat, Tengah dan Timur) b) Terpeliharanya dan teroperasikannya Rumah pompa, pompa serta pintu air
2. Peningkatan Drainase Kota	a) Tertatanya rencana induk sistem drainase yang efektif dan efisien	Penyelesaian program WJEMP (West Java Eastern Management Project)	Terselesaikannya Aksi Program Strategi Pengembangan Drainase (WJEMP)
	b) Meningkatnya kualitas sarana drainase kota	Pembebasan tanah, pembangunan dan Pemeliharaan drainase kota	a) Terbangunnya drainase kota/normalisasi b) Terlaksananya pemeliharaan drainase kota/pengerukan
	c) Meningkatnya kapasitas pengaliran saluran penghubung dan saluran mikro/permukiman	Pemeliharaan saluran-saluran penghubung dan mikro/pemukiman	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase di 5 wilayah kota

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
PERHUBUNGAN			
1. Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan	a) Meningkatnya kualitas jalan di daerah permukiman	Pemeliharaan jalan dan jembatan, arteri / kolektor dan jalan lokal	Terpeliharanya jalan dan jembatan, (arteri/kolektor dan jalan lokal) sebesar 10 persen dari total panjang jalan di DKI Jakarta
	b) Tersedianya jalan arteri untuk kawasan permukiman dan perdagangan	1. Penyediaan lahan untuk jalan dan jembatan pada koridor Busway II dan III	Tersedianya lahan untuk jalan dan jembatan pada koridor Busway II dan III
		2. Peningkatan jalan dan jembatan pada koridor Busway II dan III	Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan pada koridor Busway II dan III
		3. Pembangunan dan Peningkatan simpang tak sebidang	Terselesaikannya pembangunan 1 Underpass serta dimulainya pembangunan 1 Underpass dan 2 Flyover
		4. Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan pada jalan Arteri / Kolektor dan Lokal	Terlaksananya kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (Arteri, Kolektor dan Lokal)
		5. Pengadaan lahan untuk jalan dan jembatan Arteri, Kolektor dan Lokal.	Tersedianya lahan untuk jalan dan jembatan Arteri, Kolektor dan Lokal.
c) Meningkatnya fasilitas trotoar untuk pejalan kaki	Peningkatan fasilitas trotoar pada ruas jalan tertentu	Tersedianya fasilitas trotoar dengan standar yang telah tersedia	
2. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	a) Menurunnya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas	1. Penataan lalu lintas secara kawasan	Tersedianya fasilitas penyeberangan orang, rambu lalu lintas, marka jalan, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan secara kawasan
		2. Pengendalian dan Pengawasan operasi angkutan jalan	Terkendalinya lalulintas dan angkutan pada kawasan rawan kemacetan/rawan pelanggaran

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum	1. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas jalan	a) Bertambahnya & terpeliharanya halte b) Bertambahnya & terpeliharanya penyeberangan orang
		2. Pengembangan dan pembinaan usaha angkutan umum	Berkembangnya pelayanan feeder untuk Busway
		3. Pengembangan dan pengendalian terminal Bus dan mobil barang	Dimulainya pembangunan terminal bus Pulo Gebang
	c) Terkendalinya penggunaan frekuensi radio dan tertatanya jaringan pos secara baik	Pelaksanaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana dan fasilitas pos dan telekomunikasi	a) Bertambah dan terpeliharanya peralatan pemantau, observasi dan pengawas frekuensi b) Berkembangnya jaringan pos di Kep. Seribu
3. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum	Tersedianya angkutan umum massal	1. Pembangunan prasarana penunjang koridor Busway II dan III	Bertambahnya prasarana penunjang koridor Busway II dan III
		2. Penertiban, pengawasan dan pengendalian operasional Busway	Terkendalinya lalulintas dan angkutan Busway
		3. Pengembangan Sistem BRT/Angkutan Massal	Terlaksananya sosialisasi rencana pengembangan Busway dan angkutan umum
		4. Pelaksanaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas perhubungan laut	Terlaksananya pembangunan pelabuhan Muara Angke (tahap awal)
		5. Pengerasian dan pemeliharaan sarana prasarana UPT penyeberangan	a) Tersedianya jadwal kepastian keberangkatan serta bertambahnya frekuensi pelayanan kapal penyeberangan ke Kep. Seribu

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
			b) Terlaksananya perluasan landasan udara di Pulau Panjang Kep. Seribu (tahap awal).
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			
1. Pengembangan Perumahan	Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan hunian layak	1. Pembangunan rumah susun dan manajemen pemeliharaan	Tersedianya rumah susun sewa dan di kelola dengan nilai subsidi tepat menjangkau target sasaran
		2. Penyusunan peraturan penggalangan kemitraan	Terbangunnya rumah susun melalui kemitraan swasta untuk mencapai 2.000 unit per tahun
		3. Manajemen penyediaan lahan permukiman	Terselenggaranya supply demand lahan permukiman sesuai daya dukung pada 3 kawasan.
		4. Penyusunan kebijakan lahan perkotaan (urban land policy)	Tersedianya kebijakan lahan perkotaan (urban land policy)
2. Pengembangan Lingkungan Permukiman	a) Meningkatnya frekuensi pengawasan pengembangan lingkungan permukiman	1. Perencanaan kawasan pemukiman sehat	Tersusunnya perencanaan kawasan pemukiman sehat di 5 wilayah dan Kab. Administrasi Kep. Seribu
		2. Penataan kawasan hunian	a) Terselenggaranya Forum Konsultasi Pakar Pemukiman 4 kali dalam membentuk Dewan Pemukiman Kota b) Tersedianya data permukiman format digital ketelitian informasi Tingkat Kelurahan 10 persen c) terselesaikannya 4 kasus sengketa penghunian perumahan d) Terbinanya dan terkendalinya usaha rumah kost di 12 Kelurahan/tahun

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
	b) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat	1. Pengendalian pembangunan Permukiman	a) Terwujudnya kawasan budaya melalui karakteristik fisik hunian pada 1 lokasi b) Tersusunnya Raperda tentang standar RP4D sebagai pedoman perumahan dan permukiman di tingkat Kelurahan c) Terbangunnya rumah contoh sehat untuk hunian masyarakat Kepulauan Seribu pada 1 lokasi
		2. Perbaikan lingkungan permukiman kumuh.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman kumuh di 5 Wilayah Kodya dan Kepulauan Seribu.
3. Pelayanan Perumahan dan Permukiman	a) Meningkatnya jumlah fasilitas permukiman yang layak	1. Penyediaan air bersih dan jaringan limbah komunal	Tersedianya jaringan limbah yang melayani komunitas kumuh pada 12 lokasi
		2. Manajemen UPT di segmen komersial	Terkendalinya subsidi untuk rumah susun sewa pada batasan tertentu
	b) Menurunnya jumlah permukiman di lokasi ilegal	1. Penataan tertib hunian	Terinformasikannya pesan tertib hunian perumahan dan permukiman pada 12 Kecamatan
		2. Pemberian Bantuan hunian sementara (barak penampungan)	Terselenggaranya bantuan terhadap korban bencana permukiman ilegal pada 6 lokasi
		3. Penyusunan Kebijakan penghapusan suplai utilitas	Terlaksananya kajian pengendalian pasokan PLN ke permukiman ilegal
TATA RUANG			
1. Perencanaan Ruang	a) Semakin lengkapnya instrumen penataan ruang	1. Penguatan Organisasi Ketatakotaan	Meningkatnya efisiensi pelayanan melalui sertifikasi ISO di 2 Kecamatan dan 1 Suku Dinas

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
		2. Pengolahan data dasar	Tersedianya tambahan peta dasar pelayanan digital sebanyak 1.104 blad (40 persen dari luas wilayah)
		3. Pengkajian Struktur Ruang Kota	Tersedianya tambahan peta rencana digital sebanyak 1.104 blad (40 persen dari luas wilayah)
		4. Peningkatan Kualitas Data Perencanaan	Tersedianya tambahan basis data ketatakotaan sebanyak 1.104 blad (40 persen dari luas wilayah)
		5. Penyusunan penetapan peraturan perangkat insentif dan disentif dalam implementasi rencana tata ruang.	Tersusunnya peraturan perangkat insentif dan disentif dalam implementasi rencana tata ruang (Keputusan Gubernur).
		6. Penyusunan penetapan peraturan zoning regulasi dalam penataan ruang.	Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang zoning regulasi dalam penataan ruang.
	b) Meningkatnya luas kawasan yang tertata baik	Pengkajian Aspek Ketatakotaan	Terlaksananya Kajian Kawasan dan Lingkungan di 5 Lokasi
	c) Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang kota	Sosialisasi dan pembinaan perencanaan kota.	Tersedianya metode dan materi sosialisasi dan pembinaan tentang perencanaan kota pada tingkat Seksi DTK Kecamatan, Suku Dinas dan Dinas Tata Kota
	d) Meningkatnya green-ratio, water ratio dan road ratio	Peningkatan Green-ratio, Water- ratio dan Road-ratio	Terlaksananya perencanaan implementasi Green-ratio, Water-ratio dan Road-ratio

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
2. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	a) Tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai	Monitoring/Evaluasi Program Kerja dan Pelayanan Ketatakotaan	Terlaksananya pengembangan administrasi pelayanan di 8 (delapan) Seksi DTK Kecamatan
	b) Tersedianya sistem manajemen pertanahan yang efisien dan efektif	Perencanaan Prasarana dan Sarana Kota	Tersedianya Trace Jalur Bus Priority sebanyak 3 (tiga) jalur.
3. Penataan dan Pengawasan Bangunan	a) Meningkatnya kinerja pelayanan perijinan kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan perizinan bangunan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2000	Meningkatnya efektivitas pelayanan melalui sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 2000 minimal di 5 Kecamatan
	b) Tersedianya sistem informasi manajemen pelayanan perijinan	Pembuatan sistem informasi pelayanan, pengawasan dan penertiban bangunan	Tersedianya sistem informasi Izin penggunaan bangunan, kelayakan menggunakan bangunan dan penertiban bangunan
	c) Tersedianya peraturan tentang penataan dan pengawasan bangunan	Penyempurnaan Peraturan Daerah No.7 tahun 1991 tentang bangunan dalam wilayah DKI Jakarta	Tersusunnya Raperda pengganti peraturan Daerah No.7 tahun 1991 tentang bangunan dalam wilayah DKI Jakarta
	d) Terlaksananya penertiban terhadap pelanggar ketentuan yang berlaku	Pelaksanaan tindakan penertiban terhadap fisik bangunan dan pelaku pembangunan	Terlaksananya tindakan penertiban terhadap fisik bangunan dan pelaku pembangunan yang melanggar ketentuan
4. Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis	Terlaksananya penataan kawasan khusus/strategis	Perencanaan pengembangan ruang kota	Terlaksananya kajian ruang kota pada 2 kawasan khusus/strategis

FUNGSI/PROGRAM	INDIKATOR RENSTRADA	KEGIATAN PRIORITAS	INDIKATOR KINERJA
TATA BANGUNAN			
Penataan bangunan dan gedung Pemda	a) Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung Pemda secara bertahap	<p>1. Pembangunan Gedung Kantor Walikotamadya</p> <p>2. Pembangunan Gedung Kantor Samsat / Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya</p> <p>3. Pembangunan Gedung Dinas Pendapatan Daerah Propinsi dan Kantor Samsat / Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya</p>	<p>a) Terbangun dan beroperasinya gedung Blok B (6 lantai) dari 16 lantai yang direncanakan dan gedung serba guna/annex (2 lantai), lengkap dengan meubelair dan sarana luarnya Kantor Walikotamadya Jakarta Barat.</p> <p>b) Terbangun dan beroperasinya gedung parkir blok T (8 lantai) dan gedung serba guna blok Q (2 lantai) serta tertatanya halaman dan sistem drainase Kantor Walikotamadya Jakarta Utara.</p> <p>Terbangun dan beroperasinya gedung utama (8 lantai) dan bangunan penunjang lainnya (gedung serbaguna, gudang, gedung cek fisik, Satlantas) Kantor Samsat dan Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara</p> <p>Terbangun dan beroperasinya gedung parkir (6 lantai) dan gedung Satlantas (3 lantai) Kantor Samsat/Sudin Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Pusat</p>
	b) Terselenggaranya tertib pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung Pemda	Peningkatan kualitas dan keandalan bangunan gedung Pemda	Tertata dan terjaminnya pengoperasian sistem dan peralatan mekanikal dan elektrik serta tertanggulangnya kebocoran terowongan Tugu Monas, dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan pengunjung maupun struktur tanah dan bangunan Tugu Monas